

**PENERAPAN INKLUSI KEUANGAN DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH SUKOWATI SRAGEN
(Studi Komparasi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi)**

SKRIPSI



Oleh:

Syafa Tasya Wahyuleananda

NIM 402180095

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Wahyuleananda, Syafa Tasya, 2022. “Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan Umkm Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi)”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing, Faruq Ahmad Futaqi, M.E.

Kata Kunci : Inklusi Keuangan, UMKM, Pandemi, BPRS

Inklusi keuangan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan dapat memperoleh layanan keuangan bank dan kredit yang memadai secara tepat waktu dan biaya terjangkau. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya UMKM yang mengalami penurunan penjualan dan kesulitan dalam hal permodalan. Kurangnya permodalan UMKM yang hanya mengandalkan modal pribadi yang sangat terbatas sedangkan modal pinjaman dari lembaga keuangan sulit diperoleh karena persyaratan yang terlalu rumit dan tidak bisa dipenuhi. Disisi lain UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal akses ke lembaga keuangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi? 2) Bagaimana mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat pandemi? 3) Bagaimana perbandingan mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan ketika pandemi?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif-komparatif, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penerapan inklusi keuangan yang di lakukan dengan terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi kesekolah, ke pasar dengan memberikan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penerapan inklusi keuangan sebelum pandemi di BPRS Sukowati Sragen bisa dikatakan efektif karena beberapa tujuan dan sasaran inklusi keuangan bisa dicapai. Kendala penerapan inklusi keuangan internal bank yang masih terbatas dalam menjangkau masyarakat pelosok, kurangnya pengetahuan nasabah terkait lembaga keuangan, pembiayaan terkendala agunan sebagai *second way out*, pola hidup para pemilik usaha konsumtif. Selama masa pandemi dalam hal akses ke masyarakat lembaga keuangan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sudah efektif. Mereka terus mengakselerasi pembiayaan ke para pelaku UMKM terdampak covid. Namun yang menjadi kendala adalah belum adanya platform digital. Perbandingan tingkat efektifitas penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen bisa dikatakan lebih efektif pada saat sebelum pandemi. Perbandingan kendala yang dihadapi dalam penerapan inklusi keuangan selama pandemi lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

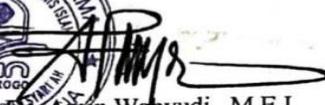
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	
1	Syafa Tasya Wahyuleananda	402180095	Perbankan Syariah	Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi)

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 20 April 2022

Mengetahui,
Dekan Jurusan Perbankan Syariah

Amin Wahyudi., M.E.I
NIP. 197502072009011007

Menyetujui,

Faruq Ahmad Futaqi., M.E.
NIP. 198311262019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi
Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi)

Nama : Syafa Tasya Wahyuleananda

NIM : 402180095

Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :

Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.S.I

NIP. 197202111999032003

Penguji I :

Mughtim Humaidi, M.IRKH.

NIDN 2027068103

Penguji II :

Faruq Ahmad Futaqi, M.E

NIP. 198311262019031006

(.....)
(.....)
(.....)



Ponorogo, Senin 30 Mei 2022

Mengesahkan,

Dekan FEBI IAIN Ponorogo

Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.

NIP: 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

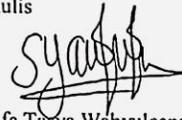
Nama : Syafa Tasya Wahyuleananda
NIM : 402180095
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi Sebelum
Pandemi dan Saat Pandemi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 08 Juni 2022

Penulis



Syafa Tasya Wahyuleananda

NIM. 402180095

LEMBAR KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafa Tasya Wahyuleananda
NIM : 402180095
Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

PENERAPAN INKLUSI KEUANGAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH SUKOWATI SRAGEN (STUDI
KOMPARASI SEBELUM PANDEMI DAN SAAT PANDEMI)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu
yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 20 April 2021

Pembuat Pernyataan,



Syafa Tasya Wahyuleananda

NIM. 402180095

COVER	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	15
2. Kehadiran Peneliti	16
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Teknik Pengolahan Data	19
7. Analisis Data	20
8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Inklusi Keuangan	
1. Pengertian Inklusi Keuanga	27

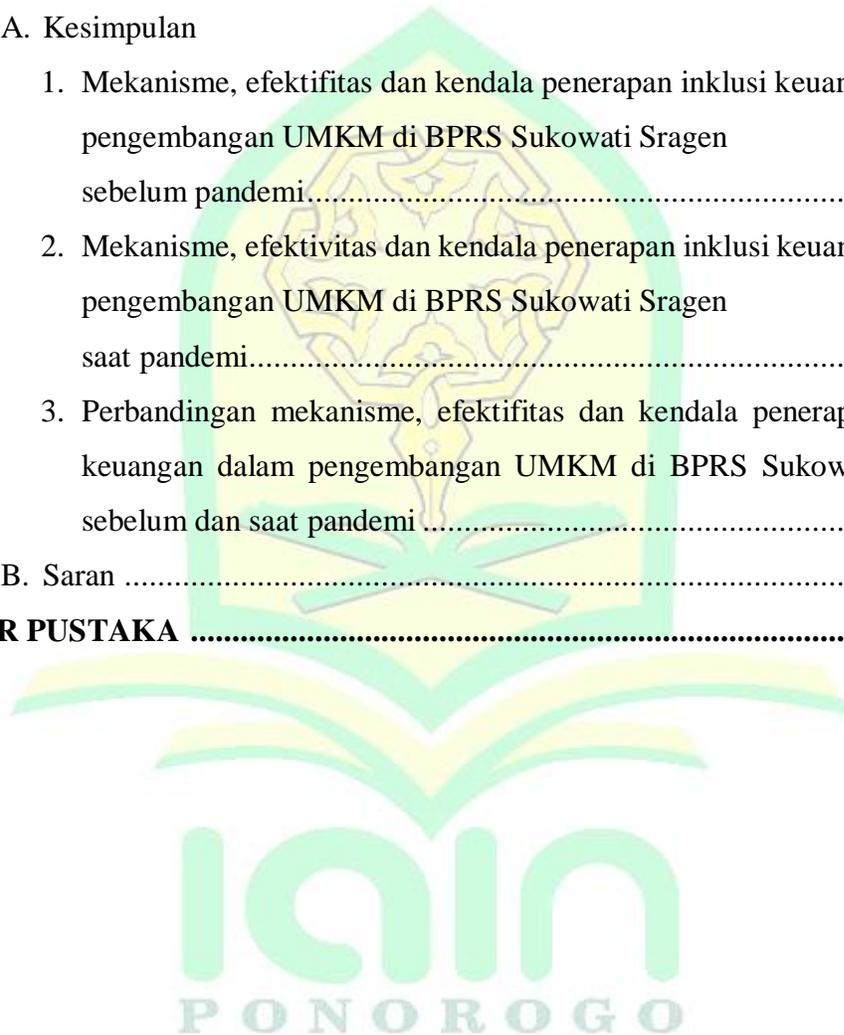
2. Dimensi Inklusi Keuangan	33
3. Tujuan dan Sasaran Inklusi Keuangan	35
4. Mekanisme Inklusi Keuangan	37
B. UMKM	
1. Pengertian UMKM	40
2. Kriteria UMKM	42
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen	
1. Pengertian Bank Pembiayaan Syariah	45
2. Pengertian Bank Pembiayaan Syariah Sukowati Sragen	45
3. Tujuan BPRS	46
D. Pandemi Covid-19	
1. Pengertian Pandemi Covid-19	49
BAB III. PAPARAN DATA	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	51
B. Mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi	60
C. Mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat pandemi	73
D. Perbandingan mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan saat pandemi.....	81
BAB IV. PEMBAHASAN	
A. Analisis mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi	87
B. Analisis mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen	

saat pandemi	99
C. Analisis perbandingan mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan saat masa pandemi	108

BAB V. PENUTUP

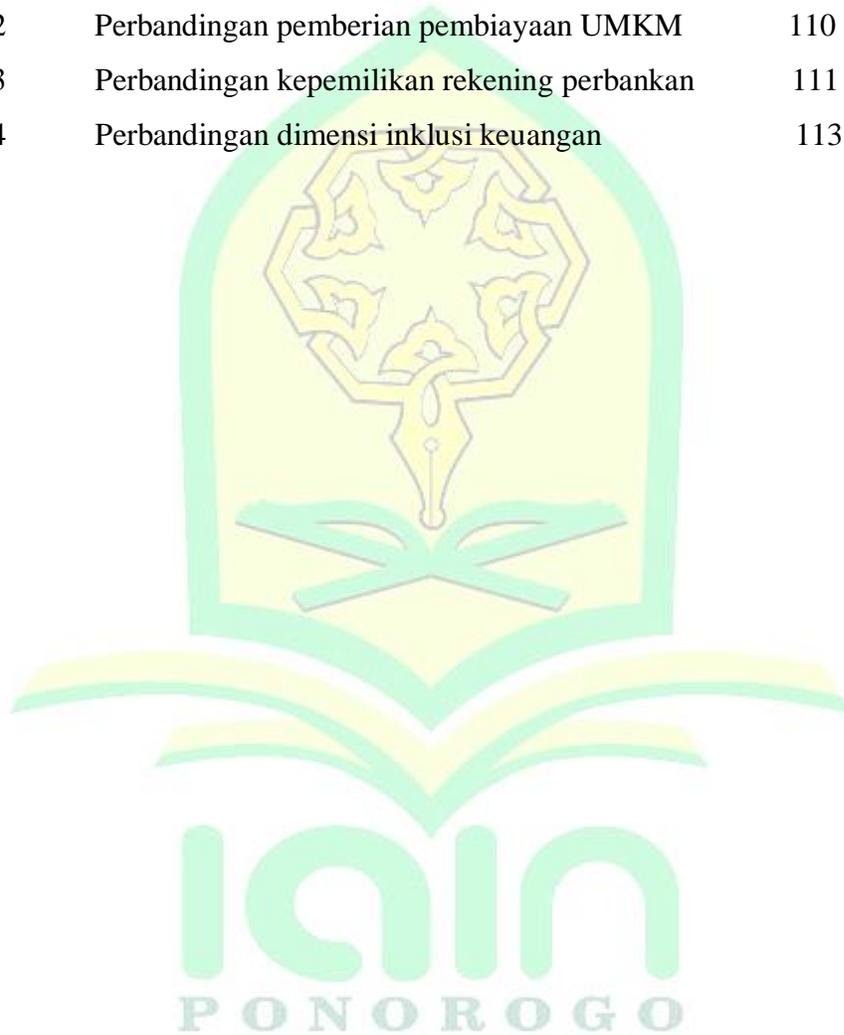
A. Kesimpulan	
1. Mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi.....	117
2. Mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat pandemi.....	117
3. Perbandingan mekanisme, efektifitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan saat pandemi	118
B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA	120
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 3.1	Struktur organisasi BPRS Sukowati Sragen	55
Tabel 4.1	Perbandingan Bulan Inklusi Keuangan	109
Tabel 4.2	Perbandingan pemberian pembiayaan UMKM	110
Tabel 4.3	Perbandingan kepemilikan rekening perbankan	111
Tabel 4.4	Perbandingan dimensi inklusi keuangan	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inklusi keuangan telah muncul sebagai paradigma pertumbuhan ekonomi baru dan telah memainkan peran penting dalam mempromosikan pengentasan kemiskinan. Hal ini mengacu pada penyedia layanan keuangan kepada masyarakat umum, termasuk kelompok istimewa yang kurang beruntung, dengan syarat dan ketentuan yang terjangkau. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial, inklusi keuangan merupakan prioritas yang sangat penting.¹ Inklusi keuangan dapat dikatakan sebagai hak masyarakat agar bisa mendapatkan pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam inklusi keuangan memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya adalah terukur, terjangkau, tepat sasaran dan berkelanjutan. Inklusi keuangan memiliki sebuah sasaran, ini salah satunya adalah pada usaha kecil mikro dan menengah. Pemilik UMKM tersebut diharapkan kedepannya mampu mencapai sebuah target dalam inklusi keuangan.² Pembiayaan inklusif diyakini akan mempermudah dan lebih efisien dalam mengurangi tumbuhnya pembiayaan

¹ Badar Alam Iqbal, dkk, "Role of banks in financial inclusion in India," *Contaduriay Administracion*, 2017, 646.

² Novia Yusufyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3, 6 (2020): 436.

dari sumber kredit informal, seperti rentenir yang mana biasanya menyalurkan kredit terlalu berlebihan dan menimbulkan bunga yang tinggi.³

Menurut keterangan Otoritas Jasa Keuangan, ada beberapa upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, tidak hanya dari sisi pengembangan produk dan layanan keuangan, tetapi juga dari empat elemen inklusi keuangan, yaitu memperluas akses keuangan, penggunaan produk dan layanan keuangan, ketersediaan produk dan layanan keuangan, serta peningkatan kualitas produk dan layanan keuangan, kualitas penggunaan produk dan jasa keuangan atau kualitas produk jasa keuangan itu sendiri.

Pada masa pandemi covid-19 kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas produksi pada masa pandemi. Dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, maka tidak lain dapat menyebabkan terdampaknya penurunan omset pada pelaku UMKM. Situasi pandemi covid-19 saat ini berdampak besar bagi UMKM di Indonesia. Jumlah usaha kecil, menengah dan mikro semakin berkurang, terutama pengusaha kecil, karena pendapatan sehari-hari mereka tidak menentu dan pendapatan mereka hanya bergantung pada konsumsi masyarakat.

³ Badar Alam Iqbal, dkk, "Role of banks in financial inclusion in India," *Contaduriay Administracion*, 2017, 646.

Banyak UMKM yang mengalami penurunan penjualan, kesulitan dalam hal permodalan.⁴

Perbankan mengakselerasi inklusi keuangan dengan strategi utama yaitu mempercepat penyaluran kredit atau pembiayaan baik dari usaha mikro hingga usaha besar. Pada masa pandemi covid-19 program Bulan Inklusi Keuangan yang terjadi setiap bulan oktober melonjak dengan adanya pembukaan rekening bank sampai 789.025 rekening baru.⁵ Peningkatan inklusi keuangan pada sektor pemilik UMKM juga naik sekitar 19% dengan langkah memberikan pembiayaan kepada UMKM yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Sragen adalah pembiayaan modal kerja murabahah dan dana bergulir. Selama masa pandemi pembiayaan di BPRS Sukowati Sragen melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah pemilik usaha yang terdampak covid. Dan juga dalam hal pembiayaan bermasalah selama pandemi ini Bank Syariah Sragen tidak mengalami peningkatan dari sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan UMKM, perbankan syariah menunjukkan perhatiannya dalam hal mengembangkan UMKM melalui inklusi keuangan. Dengan adanya bulan inklusi keuangan yang ada di BPRS Sukowati Sragen ini semakin menambah pemahaman masyarakat terkait apa itu inklusi keuangan. Kegiatan bulan inklusi keuangan melibatkan para UMKM, masyarakat umum, pelajar. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen menerapkan bulan

⁴ Melia Kusuma, "Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM," *Jurnal Among Makarti*, Vol. 14, No. 2, (2021), 165.

⁵ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/inklusi-keuangan-terus-diakselerasi-di-masa-pandemi-covid-19/>, Diakses pada 04 Maret 2022, jam 11.00.

inklusi keuangan. Bulan Inklusi Keuangan atau BIK merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian atau Lembaga Industri Jasa keuangan dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan secara serentak di wilayah Indonesia selama bulan oktober setiap tahunnya. Dalam kegiatan bulan inklusi keuangan pemerintah kota Jawa Tengah khususnya dinas sosial berkolaborasi dengan bank syariah Sragen mengadakan pameran UMKM. Dengan diselenggarakan bulan inklusi keuangan ini banyak pemilik UMKM yang terbantu dalam hal pemberian pembiayaan, pembukaan rekening oleh BPRS Sukowati Sragen. Inklusi keuangan menjadi salah satu hal penting karena berkaitan langsung dengan pemerataan ekonomi dan kesempatan masyarakat atau pemilik UMKM, khususnya yang belum memiliki rekening perbankan atau *unbanked* menjadi *underbanked*.⁶

Dalam penerapan bulan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen tentu ada perbedaan antara sebelum dan masa pandemi. Sebelum pandemi BPRS Sukowati Sragen melakukan sosialisasi-sosialisasi mendatangi sekolah-sekolah, grebek pasar untuk mengedukasi mereka yang belum mengetahui lembaga keuangan. Kami melakukan pameran berbagai produk atau jasa keuangan yang dibuat semenarik mungkin seperti adanya diskon, *reward*, *cashback*. Pamerannya itu dilakukan secara langsung dan bekerjasama dengan pemerintah setempat.

⁶ Inklusi Keuangan untuk Semua, dalam <https://www.inklusikeuangan.id/halaman/bulan-inklusi-keuangan>, (diakses pada tanggal 04 Maret 2022, jam 12.00).

Sedangkan selama pandemi kegiatan itu dilakukan secara virtual dalam bentuk webinar.⁷

Inklusi keuangan memastikan bahwa kelompok masyarakat yang rentan dapat memperoleh layanan keuangan bank dan kredit yang memadai secara tepat waktu dan biaya yang sangat terjangkau. Dalam kenyataannya berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan menengah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal seperti permodalan yang lemah. Faktor eksternal meliputi masalah dari pihak yang mengembangkan dan membina UMKM serta masih terbatasnya masyarakat terhadap lembaga keuangan. Dari perspektif UMKM, penyebab utama dalam mengakses produk atau jasa keuangan yang rendah antara lain prosedur dan pengelolaan lembaga keuangan yang dianggap terlalu rumit. Disisi lain dengan menurunnya kinerja UMKM di masa pandemi covid-19 juga menghambat pinjaman dana dalam lembaga keuangan.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rossy Wulandari bahwa penerapan inklusi keuangan yang ada di Dana Usaha Syariah Tambakboyo sudah baik. Pembiayaan sebagai tambahan permodalan yang diberikan ke para pelaku usaha merupakan wujud dari sebuah inklusi keuangan yang diterapkan. Namun dalam penerapannya tidak memberikan pelatihan bagi nasabahnya. Padahal pelatihan sangat penting bagi nasabah UMKM. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan

⁷ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

⁸ OJK, "Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019," dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>, (diakses pada 20 September 2021, Jam 15.30).

oleh Eva Yuni Kurnia yang melakukan program pelatihan forum bisnis walaupun masih belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik membahas tentang **“Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen (Studi Komparasi Sebelum Pandemi dan Saat Pandemi)”**.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi?
- b. Bagaimana mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat pandemi?
- c. Bagaimana perbandingan mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan saat pandemi?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi
- b. Untuk menganalisis mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat pandemi

- c. Untuk menganalisis perbandingan mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan saat pandemi

D. Manfaat Penelitian

Banyak manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi civitas akademi mengenai ilmu perbankan syariah tentang inklusi keuangan. Serta bagi peneliti adalah untuk mengembangkan, menerapkan, melatih berfikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan, khususnya mengenai ruang lingkup penerapan inklusi keuangan dalam mengembangkan UMKM. Dan bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam sebagai bahan dalam mengkaji persoalan yang berkaitan dengan inklusi keuangan.

- b. Secara Praktisi

Untuk dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi Bank pembiayaan rakyat syariah dalam penerapan inklusi keuangan dan menyikapi pandemi covid-19 sehingga dapat terus optimal, terutama pada pengembangan UMKM. Bagi BPRS Sukowati Sragen diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan tambahan bagi pimpinan, karyawan atau organisasi terkait penerapan inklusi keuangan.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Jurnal internasional mengenai “*Developing an Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Bank in Indonesia : A Cross – Province Analysis*” oleh M. Mahbubi Ali. Penelitian ini membahas mengenai indeks dari inklusi keuangan, ditinjau dari tiga dimensi yaitu akses, ketersediaan dan penggunaan layanan perbankan syariah. Menggunakan pendekatan syariah informasi dari perbankan dan indikator makroekonomi dunia. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai inklusi keuangan namun tidak meneliti tingkat kinerja UMKM, periode waktu yang diteliti berbeda dan analisis yang digunakan juga berbeda.⁹

Penelitian mengenai “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi pada BMT Tambakboyo)” oleh Novia Yusfianti L Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh antara inklusi keuangan dan pemberdayaan UMKM. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang efektivitas inklusi keuangan untuk UMKM namun juga terdapat perbedaan yaitu periode tahun berbeda, tidak diteliti pada masa pandemi dan tidak menggunakan komparasi atau perbandingan.¹⁰

⁹ M. Mahbubi Ali, Muhammad Rizky, dan Abrista Devi, “Developing an Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Bank in Indonesia : A Cross – Province Analysis,” *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Volume 4, Nomor 5 (2019), ii.

¹⁰ Novia Yusfianti Laili dan Rohmawati Kusumaningtiyas, “Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 6 Nomor 3 (2020), ii.

Penelitian mengenai “Studi Komparasi Inklusi Keuangan di Negara ASEAN” oleh Yana Raudhatul Jannah. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum, inklusi keuangan di negara-negara ASEAN terutama dipengaruhi oleh dimensi gangguan. Selain itu hanya variabel PDB perkapita yang tidak signifikan sebagian. Sedangkan variabel lainnya yaitu jumlah penduduk diatas 15 tahun, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk di perdesaan berpengaruh signifikan terhadap indeks keuangan. Penelitian ini menggunakan metode estimasi dengan pendekatan *Random Effect Model*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama menggunakan studi komparasi dan membahas inklusi keuangan. Sedangkan perbedaannya adalah tahun penelitian tidak sama, metode yang digunakan tidak sama.¹¹

Penelitian mengenai “Inklusi Keuangan dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali” oleh Diana Adriani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan pertumbuhan UMKM di Provinsi Bali. Hal ini dibuktikan dengan tingkat inklusifitas seluruh kabupaten di Provinsi Bali berkisar antara 0,5-0,8 yang tergolong sedang-tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah membahas mengenai inklusi keuangan dalam UMKM, meneliti sebelum

¹¹ Yana Raudhatul Jannah, “Studi Komparasi Tingkat Inklusi Keuangan di Negara ASEAN”, *Jurnal QE*, Volume 6, Nomor 2 (2017), 85.

pandemi. Sedangkan perbedaannya tidak mengkomparasi, tidak meneliti pada masa pandemi, tahun penelitian berbeda, metode penelitian berbeda.¹²

Penelitian mengenai “Peran Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kec. Moyo Utara“ oleh Wira Iko Putri Yanti. Hasil dari penelitian ini adalah kedua variabel memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Membahas mengenai inklusi keuangan terhadap UMKM. Sedangkan perbedaannya adalah tidak membahas mengenai literasi keuangan, periode tahun berbeda, tidak mengkomparasikan atau membandingkan, metode yang digunakan berbeda.¹³

Penelitian mengenai “Implementasi program inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil pada kspps Bmt Ummah Surabaya” oleh Eva Yuni Kurnia. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kemudahan dalam mengakses ke KSPPS BMT Amanah Ummah, lokasi mudah dijangkau, kualitas produk yang digunakan masih umum dan pengetahuan mengenai produk keuangan masih kurang. Pelayanan ramah dengan menggunakan sistem *pick up* sehingga memudahkan anggota yang memiliki kesibukan. Program pelatihan forum bisnis masih belum maksimal. KSPPS BMT Amanah Ummah Surabaya memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan pengajuan pembiayaan, lokasi

¹² Diana Adriani, “Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali,” *E-Jurnal Manajemen Unud*, Volume 12, Nomor 7 (2018),1.

¹³ Wira Iko Putri Yanti, “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1, 2 (2019): 1.

yang dapat dijangkau, akses juga dapat melalui via aplikasi amanah ummah *mobile*, pelayanan yang ramah dengan layanan *pick up*. Adapun dampak peran inklusi keuangan terhadap kesejahteraan pengusaha kecil yakni: pendapatan, pendidikan, dan kesehatan yang terlihat perubahannya.¹⁴

Penelitian mengenai “Analisis Inklusi Keuangan Syariah pada UMKM di masyarakat Madani Sumut Kecamatan Percut Sei Tuan” oleh Pamuji Aseh. Hasil penelitian ini adalah di dalam perkembangannya, beberapa hambatan masih dihadapi dan hambatan yang utama adalah mengenai biaya/modal usaha untuk usaha kecil. Dalam kenyataannya ada beberapa sumber dana yang mungkin untuk usaha kecil, tetapi terlambat oleh kurangnya informasi dan industri kecil (UMKM) tidak memiliki fasilitas administrasi yang memadai yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh kredit. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai inklusi keuangan terhadap UMKM, periode waktu yang diteliti berbeda dan analisis yang digunakan juga berbeda.¹⁵

Penelitian mengenai “Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan” oleh Setyani Irmawati. Hasil penelitian ini adalah model inklusi keuangan untuk UMKM Batik di Kabupaten Klaten yaitu masuknya lembaga keuangan dalam segi permodalan yaitu berbentuk kredit bunga rendah dan KUR,

¹⁴ Eva Yuni Kurnia, “Implementasi program inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil pada kspps Bmt Ummah Surabaya,” *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019), i.

¹⁵ Pamuji Aseh, “Analisis inklusi keuangan syariah pada UMKM di masyarakat Madani Sumut Kecamatan Percut Sei Tuan”, *Skripsi* (Sumut: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), ii.

yang selanjutnya dilakukan pendampingan dari lembaga keuangan. Sedangkan dari segi pemasaran, diperlukan adanya pendampingan intensif, pengikutsertaan pameran batik serta *advertisement*. Dengan model tersebut, diharapkan akan terbentuk UMKM Batik Klaten yang berkualitas.¹⁶

Penelitian mengenai “Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Curup” oleh Deri Ofit Rodika. Hasil penelitian ini adalah mekanisme Bank Syariah Mandiri KC Curup telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan inklusi keuangan pada masyarakat namun kenyataannya masih belum ada yang sesuai dengan yang diinginkan seperti bank memberikan pembiayaan dengan perbandingan besar pada tingkat pengembalian dan agunan sehingga menghambat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan yang tersedia. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai inklusi keuangan namun tidak meneliti tingkat perkembangan UMKM, periode waktu yang diteliti berbeda dan analisis yang digunakan juga berbeda.¹⁷

Penelitian mengenai “Analisis Implementasi Keuangan Inklusi Bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Nululawang Malang” oleh Samsir Bahri. Hasil dari penelitian ini adalah konsep keuangan inklusi yang berlangsung

¹⁶ Setyani Irmawati, “Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan,” *Jejak: Journal of Economics and Policy*, Volume 6, Nomor 2, (2013), i.

¹⁷ Deri Ofit Rodika, “Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Curup,” *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2018), viii.

berupa pembiayaan berbasis dana wakaf, diberikan tanpa adanya persyaratan jaminan, tanpa bunga, dan persyaratan administrasi yang mudah. Selain itu nasabah juga difasilitasi dengan program Halaqoh Mingguan dan juga pendampingan usaha. Dalam pelaksanaan inklusi keuangan masyarakat diharuskan mengikuti pelatihan. Dalam pengimplementasian inklusi keuangan tersebut terjadi peningkatan usaha, terhindar dari praktek rentenir. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel inklusi keuangan dan UMKM namun periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi, diteliti sebelum pandemi.¹⁸

Penelitian mengenai “Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya” oleh Hermuda Manustama. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa program yang bersifat inklusif pembiayaan oleh pemerintah sudah diterapkan namun belum efektif. Terbukti dari beberapa UMKM yang belum dibiayai dengan pinjaman yang menyatakan bahwa kurangnya pendekatan antara bank dan UMKM. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel inklusi keuangan dan UMKM namun periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi.¹⁹

Penelitian mengenai “Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah” oleh Muh. Awal Satrio Nugroho. Hasil

¹⁸ Samsir Bahri, “Analisis Implementasi Keuangan Inklusi Bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Nululawang Malang,” *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), viii.

¹⁹ Hermuda Manustama, “Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya,” *Skripsi* (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2018), 1.

penelitian ini adalah dimensi inklusi keuangan perbankan syariah yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM adalah *availability of banking service* bank syariah dan *usage* bank syariah., sedangkan *banking penetration* bank syariah tidak berpengaruh signifikan. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel inklusi keuangan dan UMKM namun periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi, metode penelitian yang digunakan juga berbeda.²⁰

Penelitian mengenai “Implementasi Keuangan Inklusif PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu” oleh Okter Linus Sandi. Hasil penelitian ini implementasi keuangan inklusif pada BRI Syariah Bengkulu dengan melakukan promosi baik ke media cetak maupun ke media elektronik. BRI Syariah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui karyawan, media cetak dan tertulis serta menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel inklusi keuangan dan UMKM namun periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi.²¹

Penelitian mengenai “Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatera Barat” oleh Widya Fitriana. Hasil penelitian buktikan bahwa MSCI memiliki tingkat pendidikan lebih rendah, skala yang kecil,

²⁰ Muh. Awal Satrio Nugroho, “Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” *Thesis* (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021).

²¹ Okter Linus Sandi, “Implementasi Keuangan Inklusif PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), viii.

akses terbatas yang seringkali membatasi informasi pembiayaan dan terkendala dalam inklusi keuangan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas inklusi keuangan, periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi.²²

Penelitian mengenai “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Malang) oleh Safira Nindy Febriana. Hasil penelitian ini adalah variabel inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja UMKM pada masa pandemi covid di kabupaten malang. Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel inklusi keuangan dan UMKM namun periode penelitian berbeda dan penelitian ini tidak menggunakan komparasi.²³

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif komparatif, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati.²⁴

Sedangkan penelitian komparatif merupakan riset yang bersifat

²² Widya Fitriani, “Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatera Barat,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20 Mei 2019, 1.

²³ Safira Nindy, “Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19,” *Competitive*, Volume 16, Nomor 2, (2021), ii.

²⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22.

membandingkan. Dengan penelitian ini maka akan dibangun sebuah teori yang bersifat membandingkan. Penelitian komparatif dapat menemukan sebuah perbedaan. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang.²⁵

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengangkat fakta, keadaan, dan fenomena-fenomena secara langsung dilapangan. Data akan disajikan dalam bentuk narasi yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penerapan inklusi keuangan dalam mengembangkan UMKM sebelum dan pada masa pandemi di BPRS Sukowati Sragen.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti dalam penelitian ini memiliki peran sebagai instrumen kunci yang bersifat non partisipan yaitu peneliti hanya mencari data atau informasi dari narasumber yaitu pegawai atau karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen, yang mana kehadiran penulis diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT. BPRS Sukowati Sragen yang berada di Jl. Sukowati No. 348, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 236.

Peneliti memilih lokasi tersebut karena ditemukannya suatu permasalahan tentang akses masyarakat di daerah pelosok dan masyarakat pemilik UMKM terdampak pandemi yang masih sulit untuk menjangkau layanan keuangan. Adanya pembatasan interaksi sosial pada masa pandemi covid dan berdampak pada kinerja para pelaku UMKM membuat perbankan sulit percaya untuk memberikan pembiayaan ke para pelaku UMKM. Maka dari itu peneliti ingin menggali lebih dalam terkait tentang penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat disimpulkan dalam kerangka pertanyaan penelitian. Data dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar, atau objek lain yang ditemukan di lapangan selama penelitian menggunakan penelitian kualitatif.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yakni berisi sumber data yang diperoleh penulis dari sumber informasi yaitu wawancara langsung kepada Kadiv SDM dan inklusi keuangan, general manager, admin pembiayaan dan *customer service* BPRS Sukowati Sragen.²⁶ Data sekunder yaitu bahan-bahan atau data yang

²⁶ Ibid., 16.

menjadi pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkapkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lengkap.²⁷ Dalam hal ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu website *company profile* BPRS Sukowati Sragen, dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yang diharapkan bisa melengkapi dan menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Metode yang digunakan antara lain :

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data melalui observasi dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.²⁸ Dalam hal mengamati ini mencakup kegiatan penerapan inklusi keuangan dalam UMKM di BPRS Sukowati Sragen.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan cara menyampaikan pertanyaan kepada responden.²⁹ Wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), 131.

²⁸ Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 70.

²⁹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Citra, 2004), 39.

dimana pewawancara menetapkan pertanyaannya sendiri untuk ditanyakan. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara disusun dengan rapi dan terstruktur. Teknik wawancara difokuskan untuk menggali dan memperoleh data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan dilakukan dengan Ibu Wisnu Ari Murti sebagai kadiv umum SDM dan Keuangan Inklusif, Agung Setiti, Desi Wulandari dan Fajriyah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen berupa catatan harian, surat, dan referensi lainnya.³⁰ Metode ini akan peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya tentang situasi lokasi penelitian. Hal-hal yang peneliti dokumentasikan antara lain berupa dokumen mengenai profil BPRS Sukowati Sragen yang memuat sejarah, Visi dan Misi, struktur organisasi dan SOP (Standar Operasional Prosedur) BPRS Sukowati Sragen. Kemudian peneliti juga mengambil foto ketika akan melakukan wawancara dengan para informan dan ketika mengamati objek di lapangan.

6. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data menggambarkan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan

³⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 102.

dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap berikut ini :

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan atau *editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diajukan oleh pengumpul data. Tujuan penyuntingan adalah untuk mengurangi kesalahan atau kelalaian dalam daftar pertanyaan yang telah diisi sejauh mungkin.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan langsung maupun rekaman di lapangan atau observasi. Semua data yang diperoleh dibaca dan dipelajari secara mendalam, kemudian diklasifikasikan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah untuk dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang dibutuhkan oleh peneliti.

c. Verifikasi (*verifying*)

³¹ Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 74.

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data dan informasi yang telah diperoleh dari lapangan sehingga keabsahan data tersebut dapat diketahui dan digunakan dalam penelitian.³²

d. Pembuatan kesimpulan (*concluding*).

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi data yang berkaitan dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan *concluding*, yaitu kesimpulan dari proses pengolahan data.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam satuan-satuan, mensintesis, menyusun menjadi suatu pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami.³³

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang diperoleh menggunakan metode komparatif-kualitatif, yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga adanya perbandingan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data kualitatif sebagai berikut:

³² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 104.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 126.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan segala sesuatunya secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu merekam data dan berbagai bentuk data di lapangan.

b. Reduksi Data

Merupakan meringkas, memilih poin utama, fokus pada hal-hal penting, mencari tema dan pola dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.³⁴

c. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif biasanya bersifat naratif, dilengkapi dengan matriks sehingga informasi tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Data tersebut diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data kemudian penulis menginterpretasikannya menjadi sebuah laporan tertulis yang telah disistematisasikan.

d. Menarik Kesimpulan

Dalam penelitian ini, data yang telah diolah dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik secara kritis dengan menggunakan metode

³⁴ Ibid., 338.

komparatif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang bersifat komparatif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan melihat kembali hasil reduksi dan penyajian data agar kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari masalah penelitian.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan pada berbagai waktu. Triangulasi terdiri dari triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Dimana peneliti memeriksa data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data observasi dengan data wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lain yang kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³⁵

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 199.

G. Sistematika Pembahasan

Laporan hasil penelitian ini disusun menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, inti dan akhir. Untuk memudahkan penulisan, pembahasan dalam laporan penelitian dikelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari sub bab terkait. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu merupakan bab yang memuat latar belakang masalah yang diangkat oleh peneliti, rumusan masalah yang mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian, tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan manfaat penelitian yaitu keuntungan/potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian ini selesai, metode penelitian memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisa terhadap data yang diperoleh selama penelitian di lapangan dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab II berisikan landasan teori, yang memuat deskriptif teoritis tentang inklusi keuangan, dimensi inklusi keuangan, tujuan inklusi keuangan, sasaran inklusi keuangan, pengertian UMKM, Kriteria UMKM, pengertian BPRS dan BPRS Sukowati Sragen dan pandemi covid. Bab kedua ini juga dipaparkan tentang kajian pustaka untuk riset sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III : PAPARAN DATA

Gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen mencakup gambaran secara umum mengenai BPRS Sukowati Sragen antara lain tentang: sejarah singkat BPRS Sukowati Sragen, struktur organisasi, visi dan misi, produk-produk tugas dan tanggung jawab organisasi, tentang mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum masa pandemi, selanjutnya data untuk mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat masa pandemi, dan yang terakhir perbandingan mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan pada saat pandemi.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini berisi tentang analisis hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum masa pandemi, selanjutnya analisis untuk mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen saat pandemi, dan yang terakhir analisis perbandingan mekanisme, efektivitas dan kendala penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum dan pada masa pandemi.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan penelitian.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori Inklusi Keuangan

1. Pengertian Inklusi Keuangan

Menurut Adhitya Wardono, inklusi keuangan mengacu pada proporsi individu yang menggunakan jasa keuangan. Inklusi keuangan yang paling penting adalah sebagai penyedia sebuah layanan keuangan yang tepat, dan juga memberikan pemahaman serta akses ke layanan keuangan.³⁶ Inklusi keuangan sebagai proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan dan penggunaan jasa keuangan formal kepada seluruh anggota ekonomi.³⁷

Financial inclusion (keuangan inklusif) menurut World Bank yang dikutip oleh Supartoyo dan Kasmiati adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan baik berupa bentuk harga ataupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Banyak masyarakat miskin serta masih minim terhadap barang jaminan yang dimiliki yang membuat sebagian besar masyarakat kesulitan dalam mengakses lembaga keuangan. Oleh sebab itu, dibentuklah sebuah inklusi

³⁶ Adhitya Wardono, *Inklusi Keuangan dan Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (Pustaka Abadi, 2018), 6.

³⁷ Mandira Sarma, "Index of Financial Inclusion - A Measure of Financial Sector Inclusiveness," *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*, Juli 2012, 3.

keuangan untuk lebih bisa memudahkan dan menjangkau masyarakat yang berada di kalangan bawah.³⁸

Menurut Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan memiliki arti ketersediaan akses bagi beberapa lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁹

Inklusivitas keuangan menurut Nugroho adalah upaya untuk menyediakan layanan keuangan formal kepada masyarakat miskin. Layanan keuangan ini bukan hanya skema kredit tetapi juga tabungan, alat pembayaran, dan asuransi mikro melalui institusi keuangan formal untuk mendorong pertumbuhan, efisiensi produksi, dan peningkatan kesejahteraan. Lebih luas lagi, sasaran kebijakan keuangan inklusif adalah pencapaian kondisi dimana semua kelompok masyarakat dan dunia usaha pada berbagai skala bisnis, strata sosial, dan kelas pendapatan memiliki kemampuan untuk mengakses layanan keuangan baik oleh perbankan, institusi keuangan non-bank, dan lembaga keuangan mikro.⁴⁰

³⁸ Supartoyo, *The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, 2014, 435.

³⁹ OJK. Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019, dalam <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>, (diakses pada tanggal 15 September 2021, jam 15.30).

⁴⁰ Nugroho, A.E, *Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil: Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat*, 2017, 60.

Dalam buku keuangan inklusif, Nusron Wahid banyak mengupas mulai dari teori-teori terkait sampai fakta-fakta empiris yang salah satunya tentang pembiayaan/kredit mikro. Seterusnya Wahid secara intensif mengkaji tentang keuangan inklusif (*financial inclusion*) yang didefinisikan sebagai skema pembiayaan inklusif, dengan tujuan utama memberikan berbagai layanan keuangan kepada kalangan miskin dan berpenghasilan rendah yang meliputi kredit permodalan, tabungan, asuransi, serta layanan transfer keuangan.⁴¹ Layanan ini merupakan tambahan dari layanan utama pembiayaan/kredit mikro yang sudah ada. Kepemilikan rekening (*account-holding*) dalam lembaga keuangan menjadi sebuah indikator utama sebagai tolak ukur keberhasilan (*outreach*) dari inklusi keuangan. Kepemilikan rekening berarti bahwa masyarakat memiliki dan diasumsikan mampu menggunakan akses layanan keuangan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*financing*) dan meningkatkan kegiatan ekonominya.⁴²

Berdasarkan *Center for Financial Inclusion* memberikan pengertian tentang inklusi keuangan yang berarti akses terhadap produk keuangan yang sesuai, seperti pembiayaan, tabungan, asuransi, dan pembayaran.

⁴¹ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. KPG Bekerjasama dengan Inter Café IPB dan OJK, Jakarta, 2014

⁴² Saptia, Yeni dan Nugroho, A.E, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI-Press, 2017, 63.

Pengimplementasian *financial inclusion* melalui perbankan syariah juga akan didukung oleh produk-produk perbankan syariah yang melakukan operasional berdasarkan prinsip Islam dan mengemban misi sosial kemasyarakatan.

Leyshon dan Thrift menjelaskan bahwa inklusi keuangan merupakan antitesis dari eksklusi keuangan. Proses eksklusi keuangan membuat masyarakat miskin tidak dapat mengakses benefit dari jasa keuangan dan memberikan kerugian kepada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sistem keuangan dikarenakan kurangnya akses, jaminan, riwayat kredit, dan jaringan. Inklusi keuangan telah secara luas digunakan sebagai fokus utama kebijakan di banyak pemerintahan dan bank sentral untuk membangun negaranya. Inklusi keuangan menekankan pada proses untuk memastikan bahwa akses terhadap sistem jasa keuangan and kredit yang memadai bagi masyarakat miskin dengan biaya yang terjangkau.⁴³

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat

⁴³ Leyshon, A., & Thrift, N, *Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States*, JSTOR, New Series, 1995, Volume 20, Nomor 3, 312.

ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif.⁴⁴

Inklusi keuangan adalah keterbukaan penyediaan akses dan penggunaan beragam layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau. Inklusi keuangan mencakup layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi masyarakat yang kurang terlayani secara finansial. Sistem keuangan yang inklusif adalah ketika jumlah individu atau perusahaan yang menggunakan jasa keuangan memiliki proporsi yang relatif sangat tinggi dibandingkan total jumlah individu. Tanpa keuangan yang inklusif, masyarakat harus mengandalkan jumlah tabungannya yang sangat terbatas untuk melakukan investasi atau memulai usaha baru, serta perusahaan-perusahaan hanya dapat mengandalkan keuntungan dari pendapatan produksinya. Kondisi tersebut bisa mendorong terjadinya income inequality dan melambatnya pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Dalam sistem keuangan yang memiliki fungsi baik akan menjadi sebuah sarana vital yang menyediakan berbagai keperluan masyarakat dalam jasa keuangan seperti, tabungan, pinjaman modal atau pembiayaan, dan juga berbagai keperluan pembayaran lainnya. Sistem keuangan yang inklusif akan memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses jasa keuangan

⁴⁴ Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Etikonomi*, Volume 14 Nomor 2 (Oktober 2015), 223.

⁴⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), 125.

sesuai dengan keperluan mereka tanpa ada hambatan, khususnya bagi masyarakat miskin, kelompok yang tidak diuntungkan dan juga pemilik UMKM. Tidak tersedianya akses kepada lembaga keuangan akan menyebabkan para pemilik UMKM hanya mengandalkan usaha pendanaan mereka pada tabungan mereka yang sangat terbatas, dan membuat perusahaan-perusahaan kecil hanya mendapatkan pendapatan usaha yang terbatas sehingga menghambat mereka untuk tumbuh dan berkembang.⁴⁶

Banyak orang merasakan dampak positif dari inklusi keuangan. Jika layanan keuangan yang tersedia mencakup lebih banyak masyarakat, termasuk usaha kecil, menengah dan mikro, banyak orang akan memiliki akses yang lebih mudah ke layanan keuangan, yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun nyatanya banyak pemilik usaha mikro kecil dan menengah yang justru tidak bisa menjangkau layanan keuangan di sektor perbankan syariah untuk memperoleh tambahan modal usahanya. Disisi lain dalam hal penerapan inklusi keuangan, akan membuka akses seseorang yang tidak memiliki agunan atau jaminan, tidak memiliki pekerjaan tetap, dapat dipercaya, dan tidak dapat memperoleh pembiayaan ke layanan keuangan. Hal ini berarti seseorang tidak memiliki syarat

⁴⁶ Kunt Leora Klapper, "Financial Inclusion in Afrika An Overview," *The World Bank Development Research Group*, April, 1.

peminjaman pembiayaan yaitu bankable kepada lembaga-lembaga keuangan.

2. Dimensi Inklusi Keuangan

Terdapat empat dimensi keuangan inklusif, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Aksesibilitas (*accessibility*)

Aksesibilitas dimaknai sebagai kapasitas masyarakat yang miskin dan pemilik usaha atau UMKM dalam memanfaatkan jasa lembaga keuangan. faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam penggunaan jasa keuangan dengan hal ini dapat dilihat bagaimana potensi akan hal-hal yang akan menjadi hambatan dalam membuka serta menggunakan rekening bank. Adanya suatu akses yang mencakup infrastruktur yang telah disediakan oleh perbankan agar masyarakat dapat menjangkau lembaga, produk dan jasa keuangan yang memiliki sifat formal. Untuk aksesibilitas, indikator yang dipakai dalam mengukur menggunakan jumlah UMKM yang memanfaatkan pembiayaan perbankan.

Dalam sebuah usaha, akses pembiayaan memungkinkan untuk memperluas investasi, membiayai produksi barang dan permodalan serta dapat mendorong pertumbuhan melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan inovasi. Reyes mengungkapkan pentingnya perluasan akses bagi sebagian besar masyarakat terhadap portofolio produk dan jasa

keuangan, seperti pinjaman, deposito, asuransi, pensiun, sistem pembayaran, serta mekanisme pendidikan keuangan dan perlindungan konsumen.⁴⁷

b. Penggunaan (*usage*)

Dalam dimensi penggunaan ini memiliki faktor yang digunakan untuk mengukur suatu penggunaan dalam jasa keuangan dan produk. Misalnya seperti frekuensi, lama penggunaan serta keteraturan. Dalam pengguna produk dan jasa keuangan merupakan salah satu tujuan akhir karena terdapat suatu harapan yang diminta oleh pihak pemberi yakni suatu kesejahteraan masyarakat secara adil. Aspek penggunaan dipahami sebagai kemampuan masyarakat dan UMKM untuk bisa memanfaatkan jasa layanan yang ada, baik keperluan konsumtif ataupun produktif.

c. Kualitas (*quality*)

Dalam dimensi ini memiliki faktor yang dapat digunakan untuk mengetahui suatu ketersediannya produk serta jasa keuangan apakah hal tersebut telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan kualitas pada produk dan layanan jasa keuangan yang baik maka dengan hal ini ketika suatu layanan tersebut digunakan masyarakat dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan keinginannya. Dimensi kualitas menggambarkan

⁴⁷ Reyes, G. P. Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case. Peru: Superintendency of Banking, 2010, 4.

kesesuaian jasa layanan dengan kebutuhan masyarakat/UMKM, terutama kelompok miskin dan berpendapatan rendah.⁴⁸

3. Tujuan dan Sasaran Inklusi Keuangan

Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang awal mulanya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan, bisa memiliki akses ke lembaga keuangan. Tujuan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Akses dengan biaya yang wajar untuk berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, deposito, pembayaran dan layanan transfer untuk semua rumah tangga
- b. Meningkatkan perekonomian masyarakat, mengurangi ketidakseimbangan akses ke lembaga keuangan dan produk-produk finansial
- c. Seluruh lapisan masyarakat dapat tersentuh oleh akses produk, layanan lembaga keuangan
- d. Membantu para pelaku pemilik usaha mikro maupun makro untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan dengan menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit perbankan

⁴⁸ Ibid., 4

- e. Mampu menyediakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴⁹

Ketercapaian inklusi keuangan memiliki tujuan, tujuan tersebut diantaranya:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, produk dan jasa perusahaan jasa keuangan
- b. PUJK meningkatkan penyedia produk dan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.⁵⁰

Masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah dan lintas kelompok yang menjadi kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif, perlu mendapat pemahaman yang baik tentang pentingnya inklusi keuangan. Tanpa akses ke lembaga keuangan formal, mereka tidak memiliki rekam data nasabah, mengajukan pinjaman, atau mengasuransikan diri. Hal ini berdampak terhadap kebergantungan kelompok masyarakat tersebut pada lembaga keuangan non formal yang memiliki banyak risiko. Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua

⁴⁹ Abduz Salam, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis *Digital-Banking*: Optimalisasi dan Tantangan, *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 10, No. 1, 2018, 67.

⁵⁰ Rika Desiyanti dan Hamirul, *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi* (Malang: Pustaka Learning Center, 2020), 9.

segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terlayani keuangan formal, yaitu:

- a. 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan ke layanan keuangan terbatas, atau tanpa akses sama sekali.
- b. Pelaku usaha mikro dan wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.
- c. Masyarakat lintas kelompok seperti, pekerja migran, wanita, kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda.⁵¹

4. Mekanisme Inklusi Keuangan

Kendala yang dihadapi pemilik usaha mikro kecil dan menengah dalam memperluas inklusi keuangan sebelum pandemi dan pada masa pandemi sebenarnya hampir sama yakni dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan. Sementara dalam hal meminjam hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, dan juga harus adanya jaminan yang

⁵¹ Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dalam <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>, (diakses pada tanggal 25 September 2021, jam 13.00).

disertakan.⁵² Namun pada masa pandemi seperti sekarang ini pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19 yaitu pada penetapan harga produk pembiayaan yang kadang lebih tinggi dari bank konvensional juga mempunyai pengaruh pada kurangnya minat masyarakat dalam mengakses produk pembiayaan, karena harga tersebut relatif cukup tinggi bagi pelaku UMKM, apalagi yang memiliki pendapatan relatif kecil. Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan syariah.⁵³

Penerapan inklusi keuangan melalui pembiayaan di BPRS ini memiliki tujuan mulia diberikan kepada masyarakat pra-sejahtera yang memiliki usaha mikro untuk meningkatkan peran masyarakat dalam menopang ekonomi keluarga dengan sistem kelompok guna memperbaiki taraf hidup keluarga pra-sejahtera atau berpenghasilan rendah menuju ke taraf sejahtera yang lebih baik, membina pengusaha mikro yang memiliki kelayakan usaha tetapi belum *bankable* sehingga belum layak menjadi nasabah bank, serta mewujudkan visi dan misi BPRS khususnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan membantu program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat.

⁵² Kasmianti, Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan, *ACADEMIA*, Bogor, 10.

⁵³ *Ibid.*, 11

Adapun persyaratan umum pembiayaan dalam program inklusi keuangan adalah sebelum pandemi dengan menggunakan akad murabahah modal kerja:

- a. Foto copy KTP pemohon dan suami/isteri (jika ada)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Fotocopy Akta Nikah/cerai/pisah harta (jika ada)
- d. Surat Izin Usaha
- e. Pembiayaan bertahap dengan Plafond Rp 5.000.000 – Rp. 50.000.000

Persyaratan umum pembiayaan dalam program inklusi keuangan dengan menggunakan LPDB dengan akad murabahah untuk UMKM yang sudah level atas adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai atau laporan konsolidasi 1 tahun terakhir
- b. Fotocopy KTP pengurus dan juga pengawas
- c. Fotocopy surat perizinan usaha
- d. Fotocopy objek yang akan dijaminkan
- e. Rekap data pencairan pinjaman 12 bulan terakhir ditandatangani pengurus dan di stempel
- f. Rekap data kolektibilitas piutang 12 bulan terakhir ditandatangani pengurus dan di stempel.⁵⁴

⁵⁴ LPDB KUMKM Mitra untuk Bangsa, dalam <https://www.lpdb.id/program/sektor-simpan-pinjam/>, (diakses tanggal 5 Maret 2022 jam 20.00).

B. Teori Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan suatu jenis usaha produksi yang dimiliki oleh perseorangan atau badan komersil, dan biasanya melakukan berbagai kegiatan perdagangan dengan ciri atau karakteristiknya yang berbeda.⁵⁵ Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendominasi ekonomi maju dan berkembang, hal itu bisa dilihat dari bertambahnya lapangan pekerjaan yang ada. UMKM harus didorong dan terus didukung untuk berkembang. Hal ini sangat penting agar tujuan ekonomi dan tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup dapat diwujudkan.⁵⁶ UMKM memiliki karakteristik seperti, pertama jumlah jumlah UMKM yang sangat besar, terutama usaha mikro kecil dan menengah yang ada di pelosok desa. Kedua, kontribusi UMKM yang besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Ketiga, mayoritas UMKM menggunakan teknologi yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan usaha yang ada di perkotaan. Keempat,

⁵⁵ Kurnia Cahya Lestari, *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)* (Yogyakarta: CV Budi Utama), 40.

⁵⁶ Menna Allah Ahmed Fouad, "Factors Affecting The Performance Of Small And Medium Enterprise (SMES) In The Manufacturing Sector," *International Journal Of Business and Management Studies*, Volume 2, Nomor 5 (2013), 159.

pendanaan usaha yang digunakan untuk kegiatan operasi UMKM berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman ke orang lain bahkan kepada rentenir.⁵⁷

Pengelompokan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 yang mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Pasal 1 (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Pasal 1 (2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Pasal 1 (3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan

⁵⁷ Muh. Awal Satrio Nugroho, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," 28.

bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵⁸

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berikut beberapa kriteria tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yaitu:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yaitu:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008

⁵⁹ Didiek Ahmad Supadie, Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm.59.

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2,500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁶⁰

Perkembangan UMKM diartikan sebagai tujuan yang dicapai oleh UMKM dalam jangka waktu tertentu. Hasil dari ini sangat berkaitan dengan tujuan strategi yang diterapkan usaha mikro kecil dan menengah. Indikator keuangan seperti pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk mengukur perkembangan UMKM, serta indikator non keuangan seperti kepuasan

⁶⁰ Totok Budisantoso, Nuriutomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat, Jakarta selatan, 2008, 154-155.

pelanggan dan pertumbuhan tenaga kerja. Perkembangan UMKM juga dapat diukur dari banyak aspek, seperti unit usaha, jumlah tenaga kerja dan produktivitas.⁶¹

Di masa pandemi covid-19, UMKM memiliki beberapa peran penting dalam inklusi keuangan, salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka yang mengalami kesulitan keuangan selama pandemi covid-19. Inklusi keuangan juga akan dilibatkan dalam mendorong proses pemulihan ekonomi masyarakat dan mendukung ketahanan ekonomi masyarakat. Pelaku usaha UMKM yang beroperasi di Indonesia, mereka menghadapi kesulitan keuangan akibat pandemi covid-19.

Di dalam inklusi keuangan terdapat tujuan umum yakni untuk meningkatkan perekonomian pada masyarakat. Dengan hal ini perlunya cara mengurangi kesenjangan pada ekonomi melalui peningkatan serta pemerataan pada akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Dalam menjalankan suatu usaha maka penting bagi pelaku usaha dalam melakukan pencatatan keuangan seperti arus arus, laporan laba rugi, neraca, secara terperinci. Dengan hal ini pelaku usaha UMKM dapat menggunakan data laporan keuangan untuk mempertimbangkan sebelum melakukan suatu keputusan dalam menambah modal usaha melalui fasilitas pembiayaan keuangan.

⁶¹ Ehrbeck, "Financial Inclusion, Stability, integrity, and Consumer Protection." CGAP." (<http://www.cgap.org/blog/financial-inclusionstability-integrity-and-consumer-protection>), 2013, 75.

Inklusi keuangan dapat memberikan para pelaku bisnis yang bermanfaat yaitu akses ke layanan keuangan, manfaat penggunaan produk dan layanan keuangan yang pada akhirnya dapat digunakan dan juga digunakan dalam kegiatan bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, keuntungan, permodalan, dan pertumbuhan lapangan kerja.⁶²

Target dalam memberdayakan UMKM menurut Supriyanto adalah mengacu pada meningkatnya produktivitas, tenaga kerja, produksi maupun pendapatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Dalam mengembangkan UMKM harus memerlukan strategi yang tepat, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pembiayaan yang berkaitan dengan program inklusi keuangan.⁶³

C. Teori Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip Islam atau syariah, tanpa menghalalkan adanya riba atau suku bunga yang berorientasi pada

⁶² Ibid.,77.

⁶³ Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2012, Vol. 3 No.1, 16.

masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdasarkan pada butir 4 pasal 1 UU. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah.⁶⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen merupakan bank yang melayani kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS Sukowati Sragen menawarkan layanan simpanan deposito berjangka atau tabungan, kredit atau pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.⁶⁵

2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Menurut Perwataatmadja dan Antonio, tujuan didirikannya BPRS antara lain:⁶⁶

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pernermedia Group: Jakarta, 2011, Cet. 1, 54.

⁶⁵ Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 25 Mei 2022, jam 13.00

⁶⁶ Karnaen A. Perwatadmadja dan Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 96.

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama golongan masyarakat ekonomi lemah
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja
- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina ukhuwah melalui kegiatan ekonomi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 kegiatan yang dilakukan BPRS meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan baik deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip *profit sharing* atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu, kegiatan usaha yang tidak diperkenankan dilakukan BPR dan BPRS berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, adalah:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- c. Melakukan usaha perasuransian
- d. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah ditetapkan

Semua kegiatan operasional yang dilakukan bank syariah dan kontrak keuangan yang ada di dalamnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar sama dengan ragam produk yang ditawarkan Bank Umum Syariah (BUS). Untuk penghimpunan dana berupa; akad simpanan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah. Sedangkan untuk penyaluran dana, jenis pembiayaan yang disalurkan menggunakan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, *Rahn*, *istishna*, *salam*, *Ijarah* dan *Multijasa*.⁶⁷

Perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis untuk meningkatkan akses keuangan dan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat unbanked terutama kepada masyarakat di daerah perbatasan dan terluar, meningkatkannya akses keuangan kepada masyarakat akan mempengaruhi tingkat perekonomian di masyarakat tersebut sehingga dapat merubah masyarakat dari unbankable menuju masyarakat bankable.

Bank syariah muncul dengan menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak berbasis bunga, tetapi dengan sistem bagi hasil. Pengusaha UMKM dapat memanfaatkan pembiayaan usaha mereka dari bank syariah, tanpa ada kekhawatiran munculnya gejolak pada bunga pinjaman usaha mereka. Produk pembiayaan yang diterapkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah

⁶⁷ Muhammad Khozin Ahyar, "Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal Indonesia," *Al-Tijary*, 5 (2019), 23.

pada pemilik usaha mikro kecil dan menengah pada umumnya menggunakan akad jual beli yaitu murabahah modal kerja dan LPDB UMKM. Perjanjian dalam pembiayaan UMKM ini berdasarkan akad murabahah yang sudah ditentukan di awal dan sudah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam pembiayaan UMKM ini *margin* atau keuntungan bagi bank dan nasabah tetap sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal. Nasabah dalam hal pelunasan dapat melakukan pelunasan pembiayaan lebih awal tanpa dikenakan penalti. Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku UMKM baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan wujud dari pelaksanaan fungsi dan peran dari LPDB-UMKM sebagai salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di bidang pembiayaan kepada pelaku UMKM agar dapat meningkatkan atau mengembangkan usaha yang dijalankan.⁶⁸

3. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah berdampak luar biasa terhadap aspek ekonomi, termasuk kondisi keuangan perusahaan-perusahaan yang ada. Dalam hal ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berpotensi mengalami dampak yang jauh lebih besar daripada

⁶⁸ Taufik Nugroho, "Strategi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada LPDB," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 1, Nomor 3 (Mei 2019), 57.

perusahaan besar karena keterbatasan sumber daya yang mereka miliki. mengenai dampak Covid-19, pandemi ini secara umum berdampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yakni penurunan kapasitas produksi, gangguan rantai pasok dan jalur pemasaran, serta penurunan kinerja perusahaan. Covid-19 memaksa sebagian besar negara mengambil kebijakan *lockdown* yang mengurangi aktivitas produksi global. Kapasitas produktif negara-negara produsen yang lebih rendah bisa dibilang mengurangi rantai nilai global untuk bahan mentah dan barang jadi. Lebih lanjut, berkurangnya pemasaran produk global berdampak buruk pada kinerja keuangan perusahaan.⁶⁹

Dari berbagai kasus covid-19 ini ternyata bukan hanya berdampak pada krisis kesehatan saja melainkan berdampak juga pada perekonomian masyarakat. Covid-19 ini telah berhasil menimbulkan kegelisahan para pelaku ekonomi. Dampak dari pandemi covid-19 ini sangat dirasakan oleh beberapa sektor ekonomi termasuk UMKM.

⁶⁹ Henry Nosih Saturwa, Suharno, The impact of Covid-19 pandemic on MSMEs, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 24, Nomor 1, April 2021, 67.

BAB III
PENERAPAN INKLUSI KEUANGAN DALAM MENGEMBANGKAN
UMKM DI BPRS SUKOWATI SRAGEN SEBELUM DAN SAAT
PANDEMI COVID-19

A. Gambaran Umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen

1. Sejarah Berdirinya BPRS Sukowati Sragen

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen merupakan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen yang berdiri pada tahun 2008 pada masa pemerintahan Bupati H. Untung Wiyono, dengan tujuan awal didirikannya PT. BPRS Sukowati Sragen adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sragen berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pendirian PT. BPRS Sukowati Sragen awalnya ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Nomor: 518.133/67/02/2007 tentang Pembentukan Tim Pendiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Sragen pada tanggal 24 Mei 2007, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2007 disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sragen ditandai dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Daerah (PD. BPRS) Kabupaten Sragen.⁷⁰

⁷⁰ Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 14 September 2021, jam 13.00

Melalui Surat Nomor: 002/KOM.BPRS/IX/07 perihal Permohonan Izin Prinsip tertanggal 20 September 2007 mendapat tanggapan dari Direktorat Perbankan Syariah Nomor: 10/224/DPbS perihal Persetujuan Prinsip Pendirian PD. BPRS Sragen tanggal 22 Februari 2008, dan dengan surat Nomor: 580/261/16/III/2008 tentang permohonan izin BPRS tertanggal 17 Mei 2008 memperoleh tanggapan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 10/36/KEP.GBI/DGS/2008 perihal pemberian izin usaha PD. BPRS Sragen tanggal 12 Mei 2008.

Perjalanan panjang dalam berdirinya PD. BPRS Sragen berakhir setelah pada tanggal 27 Mei bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sragen yang ke 262, Bank Syariah Sragen diresmikan oleh Bupati Sragen dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Juni 2008 setelah 45 hari beroperasi kemudian pada tanggal 16 Juli 2008 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21. tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga bentuk badan hukum bank syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). BPRS Sragen dari Perseroan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan secara resmi nama dan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas Pembiayaan Bank Rakyat Syariah (PT. BPRS) Sukowati Sragen mulai digunakan pada tanggal 2 November 2009. Hingga saat ini PT. BPRS Sukowati Sragen sudah memiliki empat kantor cabang dan empat kantor kas.⁷¹

⁷¹ Ibid., Diakses 13 September 2021, Jam 13.00

PT. BPRS Sukowati Sragen dalam operasionalnya mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

Terwujudnya lembaga keuangan yang sehat, kuat dan istiqomah dengan prinsip syariah untuk kemaslahatan masyarakat

Misi

- a. Terciptanya tata kelola & sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah yang sehat, kuat & efisien.
- b. Terwujudnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan muamalah berdasarkan prinsip syariah.
- c. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan prinsip syariah
- d. Terjalinnnya kerjasama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam rangka mempercepat pembangunan daerah.⁷²

Sejalan dengan keberhasilan implementasi visi dan misi, PT. BPRS Sukowati Sragen tahun 2019 masuk dalam 10 besar BPRS terbaik di grup BPRS dengan aset Rp100.000.000.000 hingga di bawah Rp2500.000.000 dalam pemeringkatan The Best Sharia Finance Institutions 2019 dan pada 27 Agustus 2020 mendapatkan penghargaan TOP BUMD AWARD tahun tiga kategori

⁷² Ibid., Diakses 14 September 2021, jam 13.00

sekaligus yaitu TOP BUMD Advisors, TOP BUMD CEOs dan TOP BUMD AWARDS di bidang BPR bintang 4, selain itu dalam rangka peningkatan pelayanan pada 29 April 2021 PT. BPRS Sukowati Sragen telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan perusahaan fintech ALAMI dimana kerjasama ini dapat mendukung PT. BPRS Sukowati dalam hal teknologi terkait analisis risiko digital dan akuisisi nasabah yang lebih cepat.⁷³

2. Alamat Lengkap Perusahaan

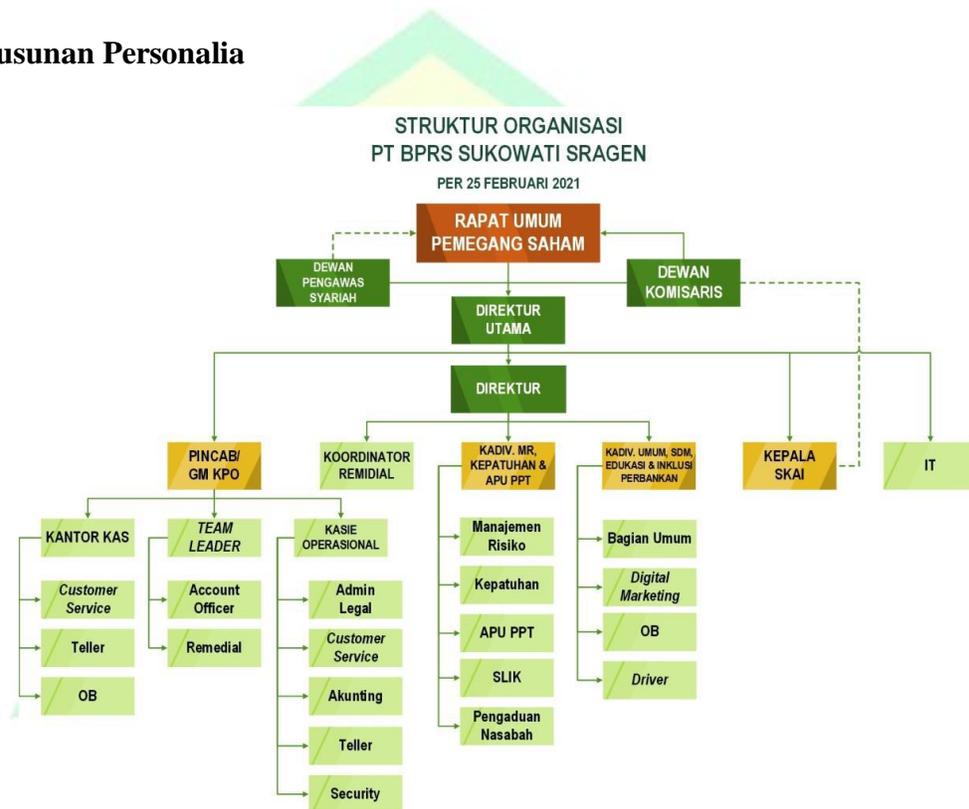
PT. BPRS Sukowati Sragen beralamat di Jl. Sukowati No.348, Kebayan 1, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57211, tepat di tengah perkotaan Sragen. PT. BPRS Sukowati Sragen juga memiliki kantor cabang dan kantor kas yang beralamat di :

Kantor Cabang	
1. Boyolali	Jl. Pandanaran No. 231 Boyolali
2. Wonogiri	Jl. Diponegoro No. 94 B Wonogiri
3. Karanganyar	Jl. Nusa Indah IV No. 18 Ngringo Jaten Karanganyar
4. Grobogan	Jl. A. Yani Ruko No. 4 Perum Grand Mutiara Grobogan
Kantor Kas	
1. Gemolong	Rejosari RT.10 Genengduwur, Gemolong
2. Sragen Kota	Ruko Renteng RT 04 RW 03 Kel. Karangtengah, Kec/Kab Sragen

⁷³ Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

3. Sambungmacan	Jl. Raya Timur KM. 15 Sambungmacan – Sragen
4. Kerjo	Jl. Dk. Derso, Ds. Sumberejo Rt 04 Rw 04 Kec. Kerjo, Kab. Karanganyar

3. Susunan Personalia



(Gambar 3.1)

Struktur Organisasi BPRS Sukowati Sragen

4. Job Deskripsi Jabatan

Berikut keterangan mengenai tugas dan peran pegawai di PT. BPRS Sukowati Sragen:

a. Dewan Pengawas Syariah

Bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari, termasuk produk yang ditawarkan kepada calon nasabah, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada publik, sesuai dengan prinsip syariah.

b. Dewan Komisaris

Bertugas mengawasi kegiatan operasional bank termasuk dalam hal memberikan arahan kepada direksi agar dalam melaksanakan tugasnya tetap patuh terhadap kebijakan perusahaan maupun ketentuan yang berlaku.

c. Dewan Direksi

Dalam hal ini direksi termasuk direktur utama dan direktur, direktur utama mempunyai wewenang atas direktur tetapi keduanya bertugas memimpin dan mengawasi kegiatan operasional sehari-hari bank sesuai dengan kebijakan umum dan keputusan RUPS.

d. Pimpinan Cabang atau General Manager

Bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi kegiatan operasional cabang dan kantor kas, termasuk yang terkait dengan alokasi pembiayaan, selain mengawasi *team leader*, *account officer*, remedial, kepala operasional, admin legal, *customer service*, *security*, *teller*, akunting dan *office boy*.⁷⁴

⁷⁴ Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

e. Koordinator Remedial

Bertugas berkoordinasi dengan bagian remediasi untuk memastikan tertibnya pelaksanaan kewajiban nasabah kepada bank.

f. Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepatuhan dan APU PPT

Bertugas mengawasi dan memberikan arahan terkait pengaduan nasabah, manajemen risiko dalam operasional bank, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

g. Kepala Divisi Umum, SDM, Edukasi dan Inklusi Perbankan

Bertanggung jawab atas administrasi kantor pengadaan, termasuk manajemen peralatan, mengelola biaya dan upah staf dengan persetujuan Dewan, dan berkoordinasi dengan staf lapangan dalam tinjauan harian jadwal piket staf dan mencatat kehadiran di acara penyuluhan pendidikan staf.⁷⁵

h. Kepala SKAI

Bertanggung jawab secara langsung dengan direktur utama, dan bertugas dalam menjaga serta menjamin kelancaran audit internal dan bertugas memantau tindak lanjut atas temuan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

⁷⁵ Ibid., Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

i. IT

Memiliki tugas memeriksa *software* IT dalam kegiatan operasional bank apakah berjalan dengan baik, serta bertugas untuk meningkatkan sistem IT dan hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi.

j. Admin Legal

Kewajiban dan tanggung jawab hukum, terutama yang berkaitan dengan kontrak yang ditandatangani sendiri dan kontrak yang diaktakan, untuk memeriksa apakah jaminan sesuai dengan dokumen jaminan yang diberikan antara jaminan fisik dan dokumen jaminan.

k. *Customer Service*

Bertugas melayani nasabah dan calon nasabah yang datang ke bank, memberikan informasi yang dibutuhkan nasabah, menampung keluhan nasabah, melakukan *cross selling* kepada nasabah dan memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami oleh nasabah.

l. *Teller*

Bertugas memberikan pelayanan kepada nasabah yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan, penarikan maupun transfer yang dilakukan oleh nasabah.⁷⁶

⁷⁶ Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

m. Account Officer

Bertugas *membranding* produk penghimpunan dana, maupun penyaluran dana agar sesuai target yang ditetapkan oleh bank.

n. Digital Marketing

Bertugas melakukan pemasaran secara daring atau online melalui media sosial perbankan, dan membuat strategi yang sesuai dengan sistem *digital marketing*.

o. Remedial

Bertugas dalam memastikan terlaksananya kewajiban nasabah terhadap bank hal ini terkait pembayaran secara tepat waktu oleh nasabah, dan melakukan penagihan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran.

p. Akunting

Bertugas mengumpulkan bukti-bukti transaksi berdasarkan transaksi setiap harinya yang dilakukan oleh nasabah untuk jurnal selanjutnya membuat laporan keuangan dan akuntansi bulanan untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan bank.⁷⁷

⁷⁷ Ibid., Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

q. Security

Bertugas menjaga ketertiban dan keamanan bank, serta melayani setiap nasabah dalam hal memberikan informasi dan bantuan jika nasabah mengalami masalah.

r. Office Boy

Bertugas menjaga bank tetap bersih dan nyaman, serta memberikan pelayanan kepada karyawan selama jam operasional kantor.

s. Driver

Bertugas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran transportasi yang diperlukan selama kegiatan operasional bank, serta bertugas memelihara kendaraan bank agar bersih dan siap pakai.⁷⁸

B. Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

1. Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung terhadap pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sukowati Sragen mengenai data dari mekanisme penerapan inklusi keuangan dalam mengembangkan UMKM di BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi dimulai dari rencana-rencana yang dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen untuk melakukan program inklusi

⁷⁸ Ibid., Diakses 14 September 2021, jam 13.00.

keuangan adalah seperti yang dijelaskan oleh Kadiv SDM dan Inklusi

Keuangan BPRS Sukowati Sragen, yaitu :

“Kalau untuk program inklusi keuangan itu ada namanya Bulan Inklusi Keuangan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Bulan inklusi keuangan yang diselenggarakan sebelum pandemi pihak kami BPRS Sukowati Sragen melakukan sosialisasi-sosialisasi mendatangi sekolah-sekolah, pasar untuk mengedukasi mereka yang belum mengetahui lembaga keuangan. Sasaran kami itu para siswa, masyarakat dan pedagang di pasar itu begitu juga pemilik usaha juga. Kami melakukan pameran berbagai produk atau jasa keuangan yang dibuat semenarik mungkin seperti adanya diskon, *reward*, *cashback* dll. Pamerannya itu dilakukan secara langsung.”⁷⁹

Berdasarkan wawancara dengan Kadiv SDM dan inklusi perbankan BPRS Sukowati Sragen, berkaitan dengan rencana dalam penerapan inklusi keuangan selama sebelum pandemi adalah dengan rutin menjalankan program bulan inklusi keuangan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober setiap tahunnya. Dalam bulan inklusi keuangan tersebut banyak kegiatan yang dilakukan untuk menarik para nasabah seperti pemberian diskon, *reward*, *cashback* dalam acara pameran produk-produk yang dimiliki bank syariah Sragen.

Penjelasan tentang penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM yang disampaikan oleh General Manager BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:

“Kalau ke pelaku usaha mikro itu kami tetap sama yaitu melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial yang mana mereka mendata para pemilik usaha yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan,

⁷⁹ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

produk-produknya apa saja. Dan setelah didata nantinya data nya itu akan diserahkan ke BPRS Sukowati Sragen kemudian akan kami bantu dalam bentuk pembiayaan kalau untuk pemilik usaha.”⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas inklusi keuangan dalam pengembangan usaha mikro maupun makro yang di terapkan BPRS Sukowati Sragen adalah dengan cara bekerja sama dengan Dinas Sosial Jawa Tengah untuk mendata pemilik usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk selanjutnya diajukan pembiayaan di BPRS Sukowati Sragen.

Dalam keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terlayani keuangan formal. Seperti yang disampaikan oleh Kadiv SDM dan inklusi perbankan sebagai berikut:

“Fokus dari adanya inklusi keuangan itu salah untuk pelaku usaha mikro itu program kredit pembiayaan melawan lembaga keuangan non formal atau para rentenir. Jadi sebisa mungkin kami mengatasi hal itu. Disamping itu adanya bulan inklusi keuangan itu digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan, kemudian juga pihak BPRS terus mempercepat penambahan jumlah rekening dan juga penggunaan produk dan layanan keuangan disini.”⁸¹

Berdasarkan penjelasan diatas inklusi keuangan yang ada di BPRS Sukowati Sragen berfokus pada masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan rendah, pemilik usaha dan lintas kelompok yang menjadi

⁸⁰ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

⁸¹ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

kelompok sasaran prioritas keuangan inklusif, perlu mendapat pemahaman yang baik tentang pentingnya inklusi keuangan.

Dalam inklusi keuangan terdapat dimensi untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akses

Sebagaimana hasil wawancara peneliti yang menanyakan dimensi akses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sebagai berikut:

“Akses ini menjadi salah satu hal yang utama dalam program inklusi keuangan. Karena semakin besar keterbukaan akses ini dapat membantu memudahkan masyarakat khususnya pemilik UMKM dalam menjangkau layanan keuangan untuk mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha yang sudah dijalankan. Idealnya dalam hal akses ini pihak bank harus menjangkau sebanyak mungkin pengguna layanan keuangan kan kalau inklusi keuangan itu. BPRS Sukowati Sragen dalam membuka akses ke layanan keuangan yaitu dengan cara terjun langsung ke masyarakat melalui pasar atau biasa disebut layanan jemput bola, selain itu juga rutin melakukan kegiatan grebek pasar. Untuk kemudahan akses yang kami berikan ke nasabah itu dengan persyaratan yang mudah, biaya administrasi yang terjangkau.”⁸²

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya BPRS Sukowati Sragen memberikan kemudahan akses ke masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangan jadi dengan seperti itu nasabah mudah tidak perlu datang langsung ke bank.

⁸² Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

b. Penggunaan

Sedangkan pemaparan hasil wawancara terkait dimensi penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:

“Penggunaan produk di BPRS Sukowati Sragen kalau dilihat itu sebenarnya banyak yang sudah memiliki rekening bank syariah Sragen, namun meskipun sudah banyak yang memiliki akses untuk menggunakan produk yang ada, sebagian kecil juga masih ada yang belum menggunakan produk dari kami dikarenakan berbagai alasan, contoh ada yang penghasilannya menurun, jarak bank jauh, prosedur kami yang dianggap masih terlalu rumit dll. Dalam penggunaan produk kami nasabah bisa dikatakan tidak menentu. Ada sebagian yang teratur dan terus menggunakan produk kami namun ada juga yang tidak menentu dikarenakan mereka memanfaatkan penghasilan mereka yang tidak menentu.”⁸³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam hal penggunaan produk dan layanan di BPRS Sukowati Sragen misalnya seperti frekuensi dan keteraturan adalah nasabah belum menggunakan produk yang dimiliki BPRS Sukowati Sragen dengan frekuensi yang terus menerus dan juga sebagian masih belum teratur.

c. Kualitas

Hasil wawancara terkait dimensi kualitas produk di BPRS Sukowati Sragen antara sebelum pandemi dan pada masa pandemi adalah sebagai berikut:

“Untuk kelengkapan produk yang ditawarkan oleh BPRS Sukowati Sragen untuk memenuhi kebutuhan nasabah bermacam-macam seperti kegiatan *Funding* dan *Financing*. Itu bisa dilihat di browsur

⁸³ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

atau website kami. Jadi dengan produk-produk yang disediakan itu memiliki kualitas yang baik sehingga ketika produk-produk itu digunakan nasabah maka mereka akan mendapatkan manfaatnya. Dalam hal memenuhi kebutuhan nasabah pemilik usaha tentunya kami berikan literasi dulu kepada mereka sebagai bekal mereka untuk menjangkau layanan yang kami sediakan untuk UMKM seperti pembiayaan murabahah modal kerja dan pembiayaan LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) program dari pemerintah untuk tambahan modal keberlangsungan usaha yang mereka jalankan.”⁸⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kualitas produk yang ada di BPRS Sukowati Sragen sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPRS Sukowati Sragen memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi nasabah yang ingin mengguakan produk-produk yang dimiliki.

Dalam mekanisme penerapan inklusi keuangan ini tidak cukup dengan banyaknya pemilik rekening dalam perbankan. BPRS harus memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Manfaat untuk para pelaku UMKM yaitu pemberian pembiayaan untuk keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Bentuk dari program inklusi keuangan terhadap pemilik UMKM sebagaimana yang dikatakan

Agung Setititi:

“Dalam pemberian pembiayaan kami melakukan kerja sama dengan pemerintah setempat guna untuk mengetahui para pemilik UMKM mana saja yang butuh bantuan dana dari kami. Selain itu kami juga terus melakukan sosialisasi-sosialisasi terkait produk yang ada dan juga kemudahan yang dimiliki ketika menggunakan produk tersebut. Banyak pemilik UMKM yang usaha nya sudah bisa dikatakan berkembang dan saat ini sudah terlepas dari pembiayaan bank syariah Sragen. Namun memang dalam pemberian pembiayaan kami harus menggunakan

⁸⁴ Desi Wulandari, Wawancara, 04 April 2022

jaminan yang bisa untuk dijamin di bank syariah sragen. Jaminan yang digunakan itu seperti BPKB, Sertifikat, dll tergantung dengan seberapa besar jumlah pembiayaan mereka.”⁸⁵

Berdasarkan dengan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam pemberian pembiayaan selain dilakukan sosialisasi dan terjun langsung dilapangan BPRS Sukowati Sragen juga melakukan bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mempermudah pendataan para UMKM yang membutuhkan permodalan. Dan dalam pengajuan pinjaman di BPRS Sukowati Sragen menggunakan jaminan tergantung besar pinjaman yang akan diajukan.

Dalam pemberian pembiayaan BPRS Sukowati memberi kemudahan kepada para nasabahnya namun tetap mempertimbangkan unsur kehati-hatian. Sebagaimana yang dikatakan oleh admin pembiayaan BPRS terkait pelaksanaan pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah untuk para pemilik usaha yaitu sebagai berikut:

“Awalnya kita menjelaskan kepada nasabah terkait apa itu pembiayaan kemudian setelah nasabah tertarik kemudian minta datanya nasabah itu tadi untuk mengisi formulir, BI Checking mengecek dan juga kelengkapan dari data nasabah, jika nasabah terdaftar DNH maka pemberian pembiayaan tidak bisa dilanjutkan, begitu juga sebaliknya jika data di BI Checking itu bagus maka pembiayaan bisa dilanjutkan dan segera dilakukan survey, survey usaha, survey jaminan, survey karakter, setelah itu dilanjutkan pengajuan ke komite, pihak komite setujunya berapa, misalnya nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta nah pada saat dicek atau dilakukan survey usahanya omset nya tidak sampai 100 juta, kelihatannya hanya di bawahnya 200 juta atau jaminan yang diberikan itu kurang maka pihak bank berhak mengurangi pembiayaan yang diajukan. Setelah itu lanjut dilakukan pembuatan akad di kantor kalau pembiayaan nya diatas 100 juta pembuatannya di notaris,

⁸⁵ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

setelah itu dilanjutkan proses pembuatan rekening baru dan nasabahnya datang ke kantor secara langsung. Setelah uangnya masuk ke rekening baru bisa diambil nasabah, pihak bank melakukan pengawasan sampai nasabah lunas setiap bulannya selama pandemi entah itu lewat hp, kunjungan langsung ke rumah, dan kami selalu menanyakan kabar usahanya bagaimana, sedangkan kalau sebelum pandemi itu paling tidak tiga bulan sekali di pantau.”⁸⁶

2. Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Efektivitas dalam inklusi keuangan diukur dengan berhasil tidaknya BPRS Sukowati Sragen dalam mencapai tujuan-tujuan inklusi keuangan yang sudah ada baik itu sebelum pandemi dan saat pandemi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terkait efektifitas penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut :

“Kalau ditanya penerapan inklusi ini sudah efektif atau belum sebenarnya BPRS sudah berperan sesuai segmen sasarannya yaitu kami menyediakan berbagai bentuk layanan keuangan, terutama dalam bidang simpan pinjam. Di BPRS Sukowati Sragen diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, dan menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana dan mudah dipahami baik itu sebelum pandemi dan saat pandemi. BPRS Sukowati Sragen telah memberikan banyak kemudahan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan perbankan, selain dalam hal pinjaman juga pada saat melakukan pelunasan. Layanan keuangan yang tersedia di BPRS Sukowati Sragen sudah bisa dianggap mampu memenuhi dan membantu UMKM dalam hal permodalan. Dengan adanya sinergi antara BPRS dan nasabah memberikan pengaruh BPRS untuk mampu membantu pendanaan pemilik usaha yang membutuhkan. Semakin jauh dan semakin dalam yang di jangkau oleh pihak BPRS maka semakin banyak juga pemilik usaha UMKM yang bisa di dibantu dalam hal permodalannya sehingga akan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan. Inklusi keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan

⁸⁶ Desi Wulandari, Wawancara, 04 April 2022

cukup membantu dalam menunjang kebutuhan UMKM. Kontribusi yang diberikan bergantung dengan jenis dan ukuran usahanya.”⁸⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya dalam penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sudah bisa dikatakan efektif karena beberapa tujuan sudah tercapai seperti menyediakan berbagai berbagai bentuk layanan keuangan terutama pada pemilik UMKM dalam bentuk simpan pinjam, prosedur yang diterapkan di BPRS Sukowati sederhana dan mudah dipahami, BPRS Sukowati juga memberikan kemudahan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan, serta BPRS Sukowati Sragen berkontribusi besar terhadap permodalan dengan penyaluran pembiayaan 11M lebih.

Sedangkan berdasarkan penjelasan dari fajriyah selaku Customer Service di BPRS Sukowati Sragen adalah menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah:

“Perlu kita ketahui semua kalau untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami terus berusaha dan memaksimalkan hal itu. Selain itu kita yang sudah berusaha menyediakan produk-produk tersebut nasabah pun harus kita edukasi terus menerus terkait dengan pengetahuan nasabah mengenai karakteristik produk dan layanan yang kami sediakan. Nah karakteristik tersebut contohnya itu seperti manfaatnya apa, risiko-risiko yang mungkin terjadi jika menggunakan produk itu apa, cara memperolehnya bagaimana, biaya dan denda nya nanti bagaimana kalau menggunakan produk itu, dan juga hak kewajiban atas sebuah produk dan layanan keuangan itu seperti apa itu harus terus kita berikan ke para nasabah kami supaya mereka tidak hanya menggunakan jasanya saja tanpa mengetahui hal-hal dasar tersebut. Jadi intinya dibekali terlebih dahulu. Karena kalau tidak seperti itu nanti akan

⁸⁷ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

menimbulkan permasalahan saat menggunakan produk dan layanan keuangan tersebut”.⁸⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya BPRS Sukowati Sragen terus memaksimalkan dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nasabah dibekali tentang karakteristik produk dan layanan keuangan seperti manfaat, resiko, cara memperoleh biaya dan denda agar dalam menggunakan produk tidak menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan wawancara dengan Agung Setiti terkait dengan tujuan inklusi keuangan yaitu Seluruh lapisan masyarakat dapat tersentuh oleh akses produk, layanan lembaga keuangan adalah :

“BPRS Sukowati Sragen berusaha untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh kemudahan penggunaan produk layanan keuangan. Kami pihak *marketing* akan terus melakukan layanan jemput bola pergi ke pasar-pasar, dan juga mendatangi nasabah yang sudah menelpon saya terlebih dahulu terus saya datang untuk saya beri penjelasan. Layanan ini dianggap mudah karena nasabah tidak perlu datang langsung ke bank. Pihak bank memberikan edukasi kepada nasabah agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. Jadi ini bukan hanya tentang menawarkan pinjaman dan melepaskannya kami juga mengedukasi dan memonitoring mereka. Kami memotivasi nasabah kami dengan memberikan pendekatan sehingga nasabah tidak keberatan membayar *margin* bagi hasilnya. Dengan menerapkan hal seperti itu di masa pandemi mampu meminimalisir terjadinya kredit macet.”⁸⁹

Berdasarkan pemapara diatas dapat disimpulkan bahwasannya cara BPRS Sukowati Sragen dalam menjangkau masyarakat adalah dengan cara

⁸⁸ Fajriyah, Wawancara, 04 April 2022

⁸⁹ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

terjun langsung ke masyarakat dengan melakukan jemput bola. Dengan dilakukannya jemput bola nasabah tidak perlu datang langsung ke bank dan lebih memudahkan nasabah BPRS Sukowati Sragen.

3. Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Dalam menjalankan inklusi keuangan dalam mengembangkan para pelaku UMKM tentu tidak berjalan mulus, BPRS Sukowati Sragen mengalami kendala-kendala. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kendala-kendala dalam hal penerapan inklusi keuangan adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya kendala itu berasal dari internal dan juga eksternal. Nah internal nya masih memiliki kemampuan terbatas sehingga belum bisa menjangkau masyarakat yang memiliki jarak lokasi jauh. Sebenarnya itu BPRS Sukowati ini memiliki kantor cabang namun berdasarkan pengamatan yang saya lakukan masih sedikit nasabah pelosok yang bisa dijangkau dan itupun belum maksimal.”⁹⁰

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kendala yang pertama berasal dari internal bank itu sendiri yang masih terbatas dalam menjangkau masyarakat yang berada didaerah pelosok. Hal itu dikarenakan masyarakat yang jauh dari bank dan juga pemahaman mereka yang juga masih kurang serta keterbatasan akses informasi perbankan.

Selanjutnya kendala yang kedua berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

⁹⁰ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

“Terus sebagian nasabah tidak mengetahui apa-apa, maka dengan seperti itu sulit untuk ditarik kepercayaannya untuk bergabung di BPRS Sukowati Sragen karena yang seperti itu biasanya akan mempengaruhi nasabah yang lain. Terus para pemilik usaha dari segi usia itu juga berpengaruh dan menjadi kan penghambat dalam melakukan edukasi terkait inklusi keuangan. Untuk pemberian pembiayaan kepada nasabah pun terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman.”⁹¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala selanjutnya terkait dengan pengetahuan nasabah yang masih kurang yang jika tidak diberikan edukasi akan mempengaruhi yang lainnya. Dari segi usia nasabah juga bisa mempengaruhi kegiatan penerapan inklusi keuangan. Dan selanjutnya agunan nasabah sebagai wujud pengurangan resiko pembiayaan bank untuk menjamin pengembalian dana nasabah penyimpan.

Kendala selanjutnya dalam penerapan inklusi keuangan berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut :

Pihak kami juga merasa khawatir karena banyak pola hidup para pengusaha yang masih konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Contohnya seperti ini seseorang mengajukan pinjaman di bank syariah Sragen dengan catatan untuk keperluan usaha yang ia jalankan tapi ketika pembiayaan itu sudah pencairan itu tidak digunakan untuk membeli barang tersebut dan malah digunakan untuk pembelian yang lain. Maka dari itu BPRS Sukowati Sragen akan lebih konsen dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar membutuhkan. Terus yang paling dominan terkait akses keuangan yang masih tertutup terutama pada masyarakat yang pelosok, mereka ingin melakukan pinjaman ke lembaga keuangan namun terkendala karena beralasan tidak memiliki jaminan sebagai agunannya sehingga mereka melakukan pinjaman ketempat yang dianggap lebih mudah.”⁹²

⁹¹ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

⁹² Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat konsumtif sulit untuk bisa mewujudkan program inklusi keuangan, selanjutnya adalah terkait kendala akses masyarakat di daerah yang pelosok sulit untuk menjangkau layanan keuangan dan lebih memilih lembaga non formal.

Sedangkan wawancara dengan salah satu nasabah pemilik UMKM terkait dengan hambatan-hambatan yang dialami dalam mengakses lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

“Awalnya saya mau melakukan pinjaman di bank syariah itu ada unsur ragu karena takut kalau tidak bisa melunasi angsurannya. Karena usaha yang saya jalankan tidak selamanya berjalan lancar. Terus saya dulu pada saat dijelaskan pegawai bank syariah sragen tidak paham sama sekali karena saya rasa persyaratannya banyak dan rumit. Dan dulu juga jaminan saya tidak sesuai karena harga jualnya lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang ingin saya ajukan.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat yang ingin bergabung dengan bank syariah masih ada unsur keraguan hal itu bisa dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang perbankan syariah. Dan masyarakat pemilik usaha juga merasakan masih rumitnya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan pembiayaan.

⁹³ Nasabah Pemilik Usaha, Wawancara, 05 April 2022

C. Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

1. Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Dalam penerapan inklusi keuangan selama pandemi berdasarkan wawancara dengan Kadiv SDM dan Inklusi Perbankan adalah sebagai berikut:

“Sedangkan pada saat pandemi kegiatan bulan inklusi keuangan dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah, pasar seperti yang sudah dilakukan sebelumnya itu terbatas dan tidak semua berjalan misalnya kami hanya ke pasar-pasar itupun terbatas karena adanya pembatasan sosial dari pemerintah. Terus kami juga hanya melakukan pameran dan sosialisasi secara virtual dalam bentuk webinar. Selama masa pandemi masih tetap dilakukan kerja sama dengan dinsos dalam hal mempercepat penyaluran pembiayaan ke pelaku UMKM”.⁹⁴

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya selama masa pandemi kegiatan bulan inklusi keuangan terbatas dikarenakan adanya pembatasan dari pemerintah. Dengan adanya pandemi covid tersebut maka bank syariah Sragen kurang maksimal dalam penerapan program inklusi keuangan. Namun mereka juga terus berusaha dengan dilakukannya pameran produk serta adanya diskon, *reward* dan *cashback* dari pihak bank syariah.

Selanjutnya peneliti bertanya terkait dengan realisasi atau wujud dari program inklusi keuangan terhadap UMKM yang sudah dijalankan BPRS Sukowati Sragen saat pandemi adalah inklusi keuangan sebagai salah satu

⁹⁴ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

langkah untuk mengentaskan kemiskinan, sebagaimana yang dikatakan oleh

General Manager BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:

“Biaya-biaya semua di salurkan ke Dinas Sosial karena kita kerjasama, terus nanti kita tinggal mantau setiap tiga bulan sekali mengenai perkembangan UMKM setelah kita biyai itu seperti apa. Contoh nya kamu sudah dapat pembiayaan dari BPRS Sukowati Sragen terus kamu dianggap sudah layak untuk berdiri sendiri setelah dibiayai maka kamu boleh terlepas dari pembiayaan kami dan pembiayaan itu selanjutnya di berikan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Semacam ini bisa disebut pengentasan kemiskinan. Perbedaannya sebelum pandemi dan pada saat pandemi jelas ada perbedaan, kalau pas pandemi begini misal nasabah mengajukan pembiayaan 50 juta gitu ya kami tidak memberikan semuanya 50 juta itu jadi misal hanya 40 juta nya yang dikasihkan.”⁹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemberian pembiayaan ke para pelau UMKM degan melakukan kerja sama bersama pemerintah setempat. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan BPRS Sukowati Sragen merupakan realisasi dari program inklusi keuangan dan juga sebuah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di masa pandemi. Namun dalam pemberian pembiayaan selama masa pandemi BPRS Sukowati Sragen benar-benar menerapkan unsur kehati-hatian.

Kepemilikan rekening merupakan sebuah indikator yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari inklusi keuangan, berdasarkan hasil wawancara dengan *customer service* adalah sebagai berikut:

“Kalau tingkat kepemilikan rekening dikalangan masyarakat itu tetap positif di tengah banyak nya dampak yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Dari sini bisa dikatakan inklusi keuangan terus meningkat dari kepemilikan rekening maupun penggunaan rekening di BPRS Sukowati

⁹⁵ Agung Setiti, Wawancara 04 April 2022

Sragen. Kepemilikan rekening di masa pandemi justru malah meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum masa pandemi, walaupun masih ada juga nasabah yang hanya memiliki rekening saja namun tidak dilanjutkan untuk transaksi. Dengan kepemilikan rekening tersebut kami perkirakan nasabah itu mampu menggunakan akses layanan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan mereka.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya kepemilikan rekening perbankan terus mengalami peningkatan selama masa pandemi. Namun peningkatan rekening perbankan tidak diimbangi dengan frekuensi produk dan layanan keuangan yang seharusnya dilakukan secara terus menerus, maka dari itu perlu ditingkatkannya frekuensi, keteraturan dari penggunaan produk dan layanan yang ada di BPRS Sukowati Sragen.

Dalam inklusi keuangan terdapat dimensi untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Akses

Hasil wawancara peneliti yang menanyakan dimensi akses yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari program inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sebagai berikut:

“Saat pandemi covid seperti ini akses pihak *marketing* untuk terjun ke lapangan sedikit berkurang mengingat adanya pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah. Meski terbatas namun pihak bank tetap berkomunikasi baik dengan nasabah.”⁹⁷

⁹⁶ Fajriyah, Wawancara, 04 April 2022

⁹⁷ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya akses bank untuk terjun langsung ke masyarakat sedikit terbatas. Namun pihak bank terus berinovasi untuk meningkatkan akses yang mudah dan biaya yang terjangkau pada saat pandemi.

b. Penggunaan

Penggunaan produk dan layanan keuangan selama masa pandemi di BPRS Sukowati Sragen berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager adalah sebagai berikut:

“Saat pandemi itu penggunaan produk perbankan dalam hal pembiayaan untuk para pemilik usaha itu kita buat alternatif pembiayaan berkelompok. Jadi dibentuk kelompok yang beranggotakan beberapa orang mungkin 4-5 dan dibentuk ketua kelompoknya yang nanti ketika akan melakukan pembiayaan itu menggunakan jaminan ketua kelompok nya itu. Nah untuk penggunaan rekening kredit pembiayaan di masa pandemi itu juga meningkat dan idealnya kalau pandemi itu kan banyak pembiayaan macet kan tapi sejauh ini tingkat kemacetan sekitar 5-10% dari sebelumnya”.⁹⁸

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya selama masa pandemi BPRS Sukowati membuat alternatif pembiayaan berkelompok dengan menggunakan jaminan ketua kelompoknya. Selain itu untuk angsurannya dikelompokkan menjadi satu ke ketua kelompok dan nanti jika sudah terkumpulkan maka langsung di serahkan ke bank syariah Sragen. Dengan adanya pembiayaan berkelompok membuat masyarakat

⁹⁸ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

yang kesulitan akses dikarenakan tidak memiliki jaminan bisa bergabung dan menjadi nasabah dari bank syariah Sragen.

c. Kualitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan admin pembiayaan terkait kualitas produk dan layanan keuangan selama masa pandemi adalah sebagai berikut:

“Untuk kelengkapan produk yang ditawarkan di BPRS Sukowati Sragen bermacam-macam mulai dari *funding* dan *financing*. Jadi dengan produk-produk yang disediakan itu memiliki kualitas yang baik sehingga ketika produk-produk itu digunakan nasabah maka mereka akan mendapatkan manfaatnya dimasa pandemi dan tentunya memberikan kemudahan bagi mereka yang membutuhkan. Dalam menjangkau layanan yang kami sediakan untuk UMKM saat pandemi itu menggunakan pembiayaan LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) program dari pemerintah untuk tambahan modal keberlangsungan usaha yang mereka jalankan. Dan untuk usaha mikro menggunakan murabahah modal kerja.”⁹⁹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya kualitas produk dan layanan di BPRS Sukowati Sragen sudah baik dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah begitu juga dengan produk yang mereka sediakan mampu memeberikan manfaat untuk nasabahnya. Kelengkapan produk di BPRS Sukowati Sragen mencakup simpanan baik tabungan deposito dan juga pembiayaan dengan menggunakan berbagai akad. Pemberian pembiayaan kepada para pelaku

⁹⁹ Desi Wulandari, Wawancara, 04 April 2022

UMKM menggunakan pembiayaan LPDB dengan akad Murabahah untuk pelaku usaha makro dan juga murabahah modal kerja untuk pelaku mikro.

Pemberian pembiayaan pada masa pandemi kepada para pemilik usaha harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang dikatakan Agung Setiti terkait dengan pembiayaan di BPRS Sukowati pada saat pandemi adalah sebagai berikut:

“Saat pandemi dilihat dulu usaha orang itu terkena dampak covid atau tidak, jangan-jangan kena dampak tetep kita biayai kan tidak bisa itu, kalau yang sudah kita biayai sebelumnya atau nasabah lama kita buat restrukturisasi. Jadi gini misal dengan jangka waktu angsuran 3 tahun yang awalnya angsurannya tinggi dibuat rendah nanti dibuat kebawah semakin besar-besar gitu angsurannya. Kami memberikan pembiayaan dengan mudah dan fleksibel yang penting jelas dulu usaha yang mereka jalankan itu apa, jaminannya ada, sumber pengembalian nya nanti juga jelas. Selama pandemi covid BPRS Sukowati Sragen menerapkan restrukturisasi pembiayaan usaha terdampak covid.”¹⁰⁰

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya bank syariah Sragen selalu memperhatikan analisis 5C dalam menganalisis nasabahnya. Mereka juga memberikan kemudahan dan fleksibel selama masa pandemi. Saat masa pandemi BPRS Sukowati Sragen menerapkan restrukturisasi pembiayaan terdampak pandemi. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan tersebut maka lebih mempermudah para pelaku usaha dalam memenuhi angsurannya.

¹⁰⁰ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

2. Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Selama masa pandemi efektifitas inklusi keuangan sudah bisa dikatakan efektif sebagaimana yang dikatakan oleh kadiv SDM dan inklusi perbankan:

“Layanan keuangan yang tersedia di BPRS Sukowati Sragen sudah dianggap mampu memenuhi dan membantu para pemilik UMKM dalam hal permodalan. Dengan adanya sinergi antara BPRS dan nasabah memberikan pengaruh BPRS untuk mampu membantu pendanaan pemilik usaha yang membutuhkan. Semakin jauh dan semakin dalam yang di jangkau oleh pihak BPRS maka semakin banyak juga pemilik usaha UMKM yang bisa di dibantu dalam hal permodalannya sehingga akan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan apalagi saat pandemi, banyak masyarakat yang usahanya itu terdampak covid dan kami selalu berusaha memberikan yang terbaik, kami beri solusi kalau ingin mengembangkan usahanya lagi untuk melakukan pembiayaan yang berkelompok dan sesuai dengan kemampuan bayar mereka. Inklusi keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan cukup membantu dalam menunjang kebutuhan UMKM. Kontribusi yang diberikan bergantung dengan jenis dan ukuran usahanya. Begitu juga pada saat pandemi sekarang ini bahkan hampir sebagian besar pemilik UMKM terdampak maka dari itu pihak BPRS akan memberikan kelonggaran dalam angsuran pembiayaan. Nah kalau saat pandemi ini kami juga berusaha mengentaskan kemiskinan bagi para pelaku usaha atau UMKM yang terdampak.”¹⁰¹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya efektifitas inklusi keuangan bisa dilihat dari keberhasilan dari tujuan inklusi keuangan yaitu BPRS Sukowati Sragen mampu memenuhi kebutuhan dan membantu pemilik UMKM dalam hal permodalan dengan mudah dan terjangkau. BPRS Sukowati Sragen terus memberikan kemudahan dalam penyaluran kredit

¹⁰¹ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

perbankan di masa pandemi dengan pemberian restrukturisasi pembiayaan terdampak covid.

Berdasarkan penjelasan dari General Manager terkait inklusi keuangan selama pandemi covid adalah sebagai bentuk pengentasan kemiskinan :

“Memang benar inklusi keuangan dimasa pandemi ini sebagai wujud pengentasan kemiskinan. Jadi semua biaya diberikan ke dinas sosial karena kita melakukan kerjasama. Jadi Contohnya kamu sudah dapat pembiayaan dari BPRS Sukowati Sragen terus kamu dianggap sudah layak untuk berdiri sendiri setelah dibiayai maka kamu boleh terlepas dari pembiayaan kami dan pembiayaan itu selanjutnya di berikan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Semacam ini bisa disebut pengentasan kemiskinan.”¹⁰²

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya inklusi keuangan saat masa pandemi sudah efektif karena dari pemaparan diatas dapat diketahui BPRS Sukowati Sragen sudah bisa menanggulangi kemiskinan walaupun belum sepenuhnya teratasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager BPRS Sukowati Sragen BPRS Sukowati Sragen inklusi keuangan juga sebagai bentuk pemulihan ekonomi ditengah pandemi:

“Dalam kaitannya dengan pemulihan ekonomi di tengah pandemi pada para pelaku UMKM kami m"empercepat pemberian kredit atau pembiayaan perbankan sehingga usaha yang dijalankan nasabah selama pandemi ini dapat kembali bangkit dan mendekati kondisi normal seperti semula lagi.”¹⁰³

¹⁰² Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

¹⁰³ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya penerapan inklusi keuangan sebagai pemulihan ekonomi ditengah pandemi covid sudah bisa berada pada segmen sasarannya dan sudah bisa berjalan.

3. Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Kendala-kendala yang dihadapi BPRS Sukowati Sragen dalam penerapan inklusi keuangan pada saat pandemi adalah sebagai berikut:

“Kendala lainnya adalah BPRS Sukowati Sragen belum punya platform digital, terus adanya peyedia kredit lain yang menawarkan kemudahan dalam pengajuan pembiayaan dan tidak adanya jaminan, sehingga masyarakat lebih tertarik menggunakan layanan keuangan non formal tersebut.”¹⁰⁴

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kendala yang dihadapi BPRS Sukowati Sragen dalam penerapan inklusi keuangan dimasa pandemi adalah belum adanya platform digital. Padahal perlu diketahui bahwasannya mobilisasi masa dimasa pandemi ini terbatas, sehingga berpengaruh juga terhadap mobilisasi ke lembaga keuangan.

D. Perbandingan Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Pandemi

1. Perbandingan Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Pandemi

¹⁰⁴ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

Dalam mekanisme penerapan inklusi keuangan yang dimulai dengan rencana-rencana awal memiliki perbandingan baik sebelum dan saat masa pandemi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kadiv SDM dan Inklusi perbankan sebagai berikut :

“Kalau persamaan itu kita sama-sama melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah, melakukan grebek pasar, dan melakukan berbagai pameran produk yang dimiliki yang dibuat semenarik mungkin dengan adanya diskon, cashback dan reward. Sedangkan untuk perbedaannya itu dari sistem pelaksanaannya saja yang awalnya kegiatannya dilakukan secara langsung namun pada saat pandemi dilakukan secara terbatas dan virtual”.¹⁰⁵

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya terdapat perbandingan penerapan inklusi keuangan. Persamaan sebelum dan saat masa pandemi adalah rencana-rencana dalam menjalankan program inklusi keuangan sama yaitu melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah, grebek pasar dan juga pameran produk yang dimiliki BPRS Sukowati Sragen. Sedangkan perbedaannya dari segi sistem pelaksanaan yang awalnya dilakukan secara langsung tapi pada saat masa pandemi dilakukan secara terbatas dan secara virtual.

Selanjutnya perbedaan mengenai realisasi atau wujud dari program inklusi keuangan berdasarkan data wawancara dengan general Manager adalah sebagai berikut:

“Dalam wujud pemberian pembiayaan ke pelaku UMKM baik sebelum dan saat pandemi terdapat perbedaan. kalau pas pandemi gini misal nasabah mengajukan pembiayaan 50 juta gitu ya kami tidak memberikan semuanya

¹⁰⁵ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

50 juta itu jadi misal hanya diberikan separuh dari jumlah pembiayaannya. Sedangkan kalau sebelum pandemi itu tingkat pemberian pembiayaannya itu tetap kami analisis dulu usaha yang dijalankan. Dan dalam tingkat pemberian pembiayaannya itu tidak 50% dari jumlah pembiayaan yang diajukan seperti pada saat pandemi mungkin kami bisa memberikan pencarian diatas 50% dari pembiayaan yang yang diajukan”.¹⁰⁶

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan antara sebelum pandemi dan saat masa pandemi itu adalah dari tingkat pemberian pembiayaan. Hal itu dikarenakan saat pandemi kemampuan bayar seseorang mengalami penurunan dikarena banyak usaha nasabah yangt terdampak pandemi covid-19.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai kepemilikan rekening sebagai indikator utama tolak ukur keberhasilan dari inklusi keuangan :

“Kalau tingkat kepemilikan rekening dikalangan masyarakat itu tetap positif di tengah banyak nya dampak yang terjadi pada masa pandemi saat ini. Dari sini bisa dikatakan inklusi keuangan terus meningkat dari kepemilikan rekening maupun penggunaan rekening di BPRS Sukowati Sragen. Perbandingan kepemilikan rekening saat sebelum pandemi standart dan ketika di masa pandemi justru malah meningkat drastis dibandingkan dengan sebelum masa pandemi, walaupun masih ada juga nasabah yang hanya memiliki rekening saja namun tidak dilanjutkan untuk transaksi. Dengan kepemilikan rekening tersebut kami perkirakan nasabah itu mampu menggunakan akses layanan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan mereka.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya selama pandemi kepemilikan rekening di BPRS Sukowati Sragen mengalami peningkatan dibandingkan dengan kepemilikan rekening pada saat sebelum pandemi.

¹⁰⁶ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

¹⁰⁷ Fajriyah, Wawancara, 04 April 2022

Selanjutnya terkait dengan perbandingan mengenai akses masyarakat ke lembaga keuangan adalah sebagai berikut:

“Akses lembaga keuangan ke masyarakat dengan melakukan jemput bola baik itu sebelum dan saat pandemi. Yang membedakan adalah pada saat masa pandemi mengalami keterbatasan interaksi sosial dengan masyarakat. Pada saat pandemi sosialisasi-sosialisasi ke sekolah tidak berjalan, kami hanya melakukan jemput bola di pasar, dan kerja sama dengan pihak setempat yang acaranya pun dilakukan secara virtual”.¹⁰⁸

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya layanan jemput bola yang digunakan untuk memperluas akses masyarakat saat pandemi BPRS Sukowati Sragen tidak bisa melakukan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah-sekolah secara langsung dikarenakan adanya pembatasan interaksi sosial. Namun BPRS Sukowati Sragen tetap melakukan perluasan akses di pasar-pasar dan juga melakukan kerja sama dengan pihak setempat.

Selanjutnya terkait dengan jenis pembiayaan yang digunakan dalam pengembangan UMKM antara sebelum dan saat pandemi adalah sebagai berikut :

“Jenis program pembiayaan di BPRS Sukowati Sragen dalam upaya inklusivitas pembiayaan rakyat/UMKM sebelum pandemi adalah pembiayaan murabahah modal kerja. Namun untuk pemilik usaha yang sudah besar mulai tahun 2020 seperti perusahaan tekstil BPRS Sukowati Sragen menggunakan produk pembiayaan murabahah LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) program dari pemerintah.”¹⁰⁹

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwasannya jenis pembiayaan yang digunakan pelaku UMKM baik mikro maupun makro sebelum pandemi menggunakan pembiayaan murabahah modal kerja

¹⁰⁸ Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

¹⁰⁹ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

sedangkan saat pandemi pemilik usaha makro menggunakan pembiayaan LPDB atau lembaga pengelola dana bergulir yang merupakan program dari pemerintah.

2. Perbandingan Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Pandemi

Perbandingan efektifitas penerapan inklusi keuangan baik sebelum dan saat pandemi berdasarkan wawancara dengan general manager adalah sebagai berikut:

“Kalau efektifitas inklusi keuangan antara sebelum dan saat masa pandemi itu menurut analisis saya lebih efektif yang sebelum pandemi, karena kalau sebelum pandemi itu kan kegiatan untuk mendukung program inklusi keuangan masih berjalan normal dan kalau pada saat pandemi itu semua dilakukan secara terbatas. Sebelum pandemi 60% masyarakat sudah bisa menjangkau layanan keuangan yang tersedia. Dan pada saat masa pandemi hanya dibawah 60% yang bisa dijangkau.”¹¹⁰

Berdasarkan analisis peneliti dalam penerapan inklusi keuangan BPRS Sukowati Sragen sudah bisa dikatakan efektif karena inklusi keuangan yang diterapkan di BPRS Sukowati Sragen mampu mencapai tujuan-tujuan yang sudah ada. Walaupun tujuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi dan berjalan lancar

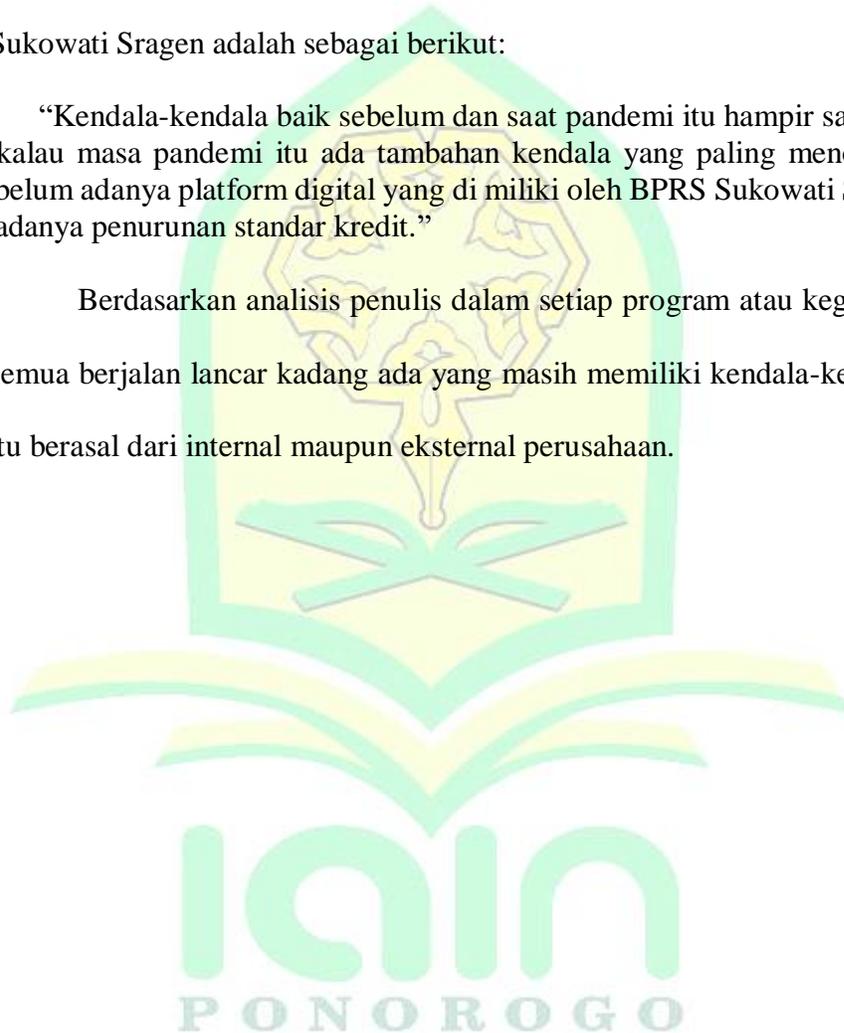
3. Perbandingan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Masa Pandemi

¹¹⁰ Agung Setiti, Wawancara, 04 April 2022

Dalam peneran inklusi keuangan masih terdapat kendala kendala baik itu sebelum dan saat masa pandemi. Perbandingan kendala yang dihadapi dalam penerapan inklusi keuangan selama pandemi lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Sebagaimana yang dikatakan general manager BPRS Sukowati Sragen adalah sebagai berikut:

“Kendala-kendala baik sebelum dan saat pandemi itu hampir sama. Cuma kalau masa pandemi itu ada tambahan kendala yang paling menonjol yaitu belum adanya platform digital yang di miliki oleh BPRS Sukowati Sragen dan adanya penurunan standar kredit.”

Berdasarkan analisis penulis dalam setiap program atau kegiatan tidak semua berjalan lancar kadang ada yang masih memiliki kendala-kendala baik itu berasal dari internal maupun eksternal perusahaan.



BAB IV

**ANALISA PENERAPAN INKLUSI KEUANGAN DALAM
PENGEMBANGAN UMKM DI BPRS SUKOWATI SRAGEN
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

A. Analisis Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Mengembangkan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

1. Analisis Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Bulan Inklusi Keuangan atau BIK merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian atau Lembaga Industri Jasa keuangan dan stakeholder untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan secara serentak di wilayah Indonesia selama bulan oktober setiap tahunnya.

Dalam menjalankan program inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen diawali dengan rencana-rencana kedepannya yang akan dilakukan guna untuk mensukseskan program dari inklusi keuangan. Program bulan inklusi keuangan merupakan salah satu bentuk inklusi keuangan yang digunakan untuk memperluas akses masyarakat ke lembaga keuangan. Bulan inklusi keuangan yang diselenggarakan BPRS Sukowati Sragen dalam bentuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mendatangi sekolah-sekolah, pasar serta pemberian edukasi mereka yang belum mengetahui lembaga keuangan. BPRS Sukowati

Sragen mempunyai sasaran dalam program inklusi keuangan diantaranya para siswa, masyarakat dan pedagang pasar dan juga pemilik usaha. Pihak bank juga melakukan pameran berbagai produk atau jasa keuangan yang dilakukan secara langsung dan dibuat semenarik mungkin seperti adanya diskon, *reward*, *cashback*.

Menurut analisis peneliti, penerapan inklusi keuangan yang dilakukan BPRS Sukowati Sragen sebelum pandemi sudah cukup baik dan maksimal. Dengan terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi ke sekolah, ke pasar dengan memberikan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat maka dapat semakin mempercepat peningkatan inklusi keuangan dan semakin membuka akses masyarakat dalam menyentuh layanan keuangan yang tersedia.

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terlayani keuangan formal, yaitu:

- a. 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan ke layanan keuangan terbatas, atau tanpa akses sama sekali.
- b. Pelaku usaha mikro dan wirausaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.
- c. Masyarakat lintas kelompok seperti, pekerja migran, wanita, kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar, serta kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda.¹¹¹

Fokus sasaran dari program inklusi keuangan yang dilakukan di BPRS Sukowati Sragen adalah kepada lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, pelaku usaha mikro dengan memberikan layanan pembiayaan perbankan untuk melawan lembaga keuangan non formal seperti rentenir.¹¹²

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwasannya fokus sasaran inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen sudah tepat. Namun yang perlu ditingkatkan lagi adalah pihak bank lebih berfokus dalam melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah setempat untuk lebih bisa menjangkau masyarakat yang berada di daerah pelosok agar bisa menggunakan produk dan layanan keuangan yang ada dengan mudah.

Menurut Peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan memiliki arti menyediakan akses ke berbagai lembaga keuangan, produk dan layanan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹³

¹¹¹ Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dalam <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>, (diakses pada tanggal 25 September 2021, jam 13.00).

¹¹² Lihat Transkrip Wawancara nomor 01/W/13-IX/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹¹³ OJK. Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. Diakses pada 15 September 2021, jam 15.30, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>

Berdasarkan hasil wawancara BPRS Sukowati Sragen menyediakan akses masyarakat ke produk perbankan dengan memberikan pembiayaan ke pelaku usaha makro dan mikro menggunakan murabahah modal kerja.¹¹⁴

Berdasarkan data diatas peneliti menganalisis dalam pemberian pembiayaan ke para pelaku UMKM BPRS Sukowati Sragen sudah sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Hal itu bisa dilihat dari jenis pembiayaan yang digunakan. UMKM melakukan pembiayaan di BPRS Sukowati Sragen untuk tambahan modal usaha yang mereka jalankan, maka dari itu jenis pembiayaan yang digunakan adalah murabahah modal kerja. Dengan pemberian pembiayaan sebagai tambahan modal usaha tersebut maka kesejahteraan pemilik usaha bisa terwujud.

Nusron Wahid Banyak pembahasan mulai dari teori yang relevan hingga fakta empiris, salah satunya tentang pembiayaan/keuangan mikro. Selain itu, Wahid mendalami inklusi keuangan, yang didefinisikan sebagai skema pembiayaan inklusif yang tujuan utamanya adalah menyediakan berbagai layanan keuangan bagi kelompok miskin dan berpenghasilan rendah, termasuk kredit modal, tabungan, asuransi, dan layanan transfer keuangan.¹¹⁵

Dalam pemberian skema pembiayaan yang inklusif kepada para pelaku usaha BPRS Sukowati Sragen melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial yang

¹¹⁴ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹¹⁵ Nusron Wahid, *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. KPG Bekerjasama dengan Inter Café IPB dan OJK, Jakarta, 2014

mana mereka mendata para pemilik usaha yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan tentang perbankan, produk-produknya apa saja. Dan setelah didata nantinya data nya itu akan diserahkan ke BPRS Sukowati Sragen kemudian akan di bantu dalam bentuk pembiayaan.

Dengan melakukan kerjasama bersama pemerintah setempat maka dapat memperlancar penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen. Pola kerja sama yang diterapkan BPRS Sukowati Sragen dengan pemerintah daerah sudah tepat karena kerjasama tersebut dirancang untuk berfokus pada penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM yang membutuhkan dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Dalam inklusi keuangan terdapat dimensi untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemampuan masyarakat miskin dan pemilik usaha atau UMKM untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggunakan jasa keuangan menunjukkan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank.¹¹⁶

BPRS Sukowati Sragen dalam membuka akses ke layanan keuangan yaitu dengan cara terjun langsung ke masyarakat melalui pasar atau sekolah-

¹¹⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

sekolah yang biasa disebut layanan jemput bola, selain itu juga rutin melakukan kegiatan grebek pasar. Untuk kemudahan akses yang kami berikan ke nasabah itu dengan persyaratan yang mudah, biaya administrasi yang terjangkau.

Menurut analisis peneliti dalam hal keterbukaan akses kepada seluruh lapisan masyarakat BPRS Sukowati Sragen sudah mampu menggiring masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan perbankan. Namun hal itu masih didominasi oleh masyarakat perkotaan. Maka dari itu BPRS Sukowati Sragen perlu meningkatkan akses masyarakat yang tinggal dipelosok dengan pemberian literasi keuangan yang cukup.

b. Penggunaan

Dalam dimensi penggunaan ini, terdapat faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa dan produk keuangan. Misalnya, seperti frekuensi, durasi penggunaan, dan keteraturan.¹¹⁷

Dalam hal penggunaan produk dan layanan di BPRS Sukowati Sragen misalnya seperti frekuensi dan keteraturan adalah nasabah belum menggunakan produk yang dimiliki BPRS Sukowati Sragen dengan frekuensi yang terus menerus dan juga sebagian masih belum teratur.¹¹⁸

¹¹⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹¹⁸ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

Berdasarkan analisis peneliti disimpulkan bahwa penggunaan layanan yang digunakan di BPRS Sukowati Sragen sudah sesuai. Nasabah tidak perlu datang ke bank dikarenakan BPRS Sukowati Sragen menggunakan layanan jemput bola. Namun dalam kaitannya dengan frekuensi dan keteraturan penggunaan produk dan layanan keuangan perlu ditingkatkan lagi.

c. Kualitas

Dalam dimensi ini terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan produk dan jasa keuangan apakah telah memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan kualitas produk dan jasa keuangan yang baik, dalam hal ini ketika suatu jasa digunakan, masyarakat dapat memberikan manfaat sesuai dengan keinginannya.¹¹⁹

Kualitas produk yang ada di BPRS Sukowati Sragen sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. BPRS Sukowati Sragen memberikan kemudahan dan manfaat yang besar bagi nasabah yang ingin menggunakan produk-produk yang dimiliki.¹²⁰

¹¹⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹²⁰ Lihat Transkrip Wawancara nomor 03/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

2. Analisis Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Efektifitas penerapan inklusi keuangan di lihat dari ketercapaian dari tujuan-tujuan dan sasaran inklusi keuangan. Tujuan dari inklusi keuangan adalah untuk mendorong masyarakat yang awal mulanya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan, bisa memiliki akses ke lembaga keuangan. Tujuan lainnya adalah sebagai berikut:¹²¹

- a. Seluruh lapisan masyarakat dapat tersentuh oleh akses produk, layanan lembaga keuangan.

BPRS Sukowati Sragen berusaha untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar dapat memperoleh kemudahan penggunaan produk layanan keuangan. pihak *marketing* terus melakukan layanan jemput bola pergi ke pasar-pasar, dan juga mendatangi nasabah yang sebelumnya sudah menghubungi untuk selanjutnya diberikan penjelasan. Layanan ini dianggap mudah karena nasabah tidak perlu datang langsung ke bank. Pihak bank memberikan edukasi kepada nasabah agar dapat menjalankan usahanya dengan baik. BPRS Sukowati Sragen juga mengedukasi dan memonitoring para nasabahnya. Pihak bank juga memotivasi nasabah dengan terus memberikan pendekatan sehingga nasabah tidak keberatan dalam

¹²¹ Abduz Salam, "Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Berbasis *Digital-Banking*: Optimalisasi dan Tantangan, *Jurnal Al-Amwal*, Volume 10, Nomor 1, (2018), 67.

membayar *margin* bagi hasilnya. Dengan menerapkan hal seperti itu mampu meminimalisir terjadinya kredit macet.¹²²

Berdasarkan analisis penulis dalam memperluas akses BPRS Sukowati sudah cukup baik. Pihak bank terjun langsung ke lapangan untuk memperluas akses. Namun yang perlu ditingkatkan perlunya perluasan akses kepada lapisan masyarakat yang berada di daerah pelosok-pelosok supaya sasaran inklusi keuangan bisa terwujud semuanya.

- b. Membantu para pelaku usaha mikro maupun makro untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan dengan menyediakan layanan keuangan dalam bentuk kredit perbankan

Di BPRS Sukowati Sragen diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah, dan menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana dan mudah dipahami. BPRS Sukowati Sragen telah memberikan banyak kemudahan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan perbankan, selain dalam hal pinjaman juga pada saat melakukan pelunasan. Layanan keuangan yang tersedia di BPRS Sukowati Sragen sudah bisa dianggap mampu memenuhi dan membantu UMKM dalam hal permodalan. Dengan adanya sinergi antara BPRS dan nasabah memberikan pengaruh BPRS untuk mampu membantu pendanaan pemilik usaha yang membutuhkan. Semakin jauh dan semakin dalam yang di

¹²² Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

jangkau oleh pihak BPRS maka semakin banyak juga pemilik usaha UMKM yang bisa di bantu dalam hal permodalannya sehingga akan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan.¹²³

Berdasarkan analisis peneliti memang dalam penerapan inklusi keuangan pada para pelaku UMKM dalam bentuk pembiayaan BPRS Sukowati Sragen terus memunculkan performa yang sangat bagus dan sangat efektif. BPRS Sukowati Sragen mampu mencapai target dah bahkan melampaui target dari bank tersebut. BPRS Sukowati Sragen sangat berperan besar dalam pembiayaan UMKM sebagai tambahan modal usaha.

c. Mampu menyediakan produk layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah

BPRS Sukowati Sragen terus memaksimalkan dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nasabah dibekali tentang karakteristik produk dan layanan keuangan seperti manfaat, resiko, cara memperoleh biaya dan denda agar dalam menggunakan produk tidak menimbulkan permasalahan.¹²⁴

Berdasarkan analisis penulis BPRS Sukowati Sragen sudah maksimal dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Produk yang disediakan sangat beragam sehingga nasabah tinggal memilih sesuai

¹²³ Lihat Transkrip Wawancara nomor 01/W/13-IX/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹²⁴ Lihat Transkrip Wawancara nomor 05/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

dengan kebutuhan mereka. BPRS Sukowati Sragen juga memberi edukasi perbankan sehingga nasabah mampu memilih produk yang sesuai, manfaatnya dan juga risiko produk tersebut.

3. Analisis Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum Pandemi

Financial inclusion (keuangan inklusif) menurut *World Bank* yang dikutip oleh Supartoyo dan Kasmiasi adalah sebagai kegiatan komprehensif atau menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa keuangan.¹²⁵

Dalam penerapan inklusi keuangan di BPRS Sukowati Sragen masih mengalami berbagai hambatan-hambatan, sebagaimana yang dikatakan oleh Agung Setiti hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan inklusi keuangan adalah sebagai berikut :¹²⁶

- a. Kendala yang pertama berasal dari internal bank itu sendiri yang masih terbatas dalam menjangkau masyarakat yang berada didaerah pelosok. Hal itu dikarenakan masyarakat yang jauh dari bank dan juga pemahaman mereka yang juga masih kurang serta keterbatasan akses informasi perbankan.

¹²⁵ Supartoyo, The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, (2014), 435.

¹²⁶ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

- b. Mulai dari ketidaktahuan nasabah membuat nasabah sulit untuk ditarik kepercayaannya untuk bergabung di BPRS Sukowati Sragen dan faktor usia yang beragam serta mereka belum pernah terjangkau lembaga keuangan mempengaruhi hal tersebut.
- c. Untuk pembiayaan terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman. Agunan atau jaminan sebagai *second way out* yang dilakukan BPRS merupakan bentuk pengurangan risiko pembiayaan bank untuk memastikan dana dikembalikan. Sebagai pilihan kedua untuk melunasi kewajiban pembiayaan, penjualan jaminan harus dilaksanakan secepat mungkin agar tidak terbebani oleh masalah kredit/pembiayaan yang buruk untuk kedepannya.
- d. Pihak BPRS merasa khawatir karena banyak pola hidup para pemilik usaha yang ada di Jawa Tengah yang konsumtif, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Biasa nasabah melakukan pinjaman di bank dengan niat awal untuk modal usaha namun pada akhirnya pembiayaan itu tidak digunakan untuk kebutuhan usaha melainkan kebutuhan lainnya. Sehingga BPRS Sukowati Sragen akan konsen dengan pengusaha-pengusaha yang benar-benar membutuhkan. Dan pihak BPRS akan lebih memonitoring nasabah agar pembiayaan yang ia lakukan di bank benar-benar digunakan untuk tambahan modal usaha yang dijalankan.

- e. Kecilnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan itu sebanding dengan tertutupnya akses keuangan bagi masyarakat yang sama sekali belum pernah menjangkau lembaga keuangan. Mengatasi hal tersebut sebenarnya pihak bank sudah menerapkan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan agar para masyarakat yang belum menjangkau layanan keuangan bisa menjangkaunya.
- f. Akses keuangan yang masih tertutup terutama pada masyarakat yang pelosok, mereka ingin melakukan pinjaman ke lembaga keuangan namun terkendala karena beralasan tidak memiliki jaminan sebagai agunan.

B. Analisis Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

1. Analisis Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Bulan Inklusi Keuangan atau BIK merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian atau Lembaga Industri Jasa keuangan dan stakeholder untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan secara serentak di wilayah Indonesia selama bulan oktober setiap tahunnya.

Selama masa pandemi kegiatan bulan inklusi keuangan terbatas dikarenakan adanya pembatasan dari pemerintah. Dengan adanya pandemi covid tersebut maka bank syariah Sragen kurang maksimal dalam penerapan program inklusi keuangan. BPRS Sukowati Sragen tidak bisa melakukan

sosialisasi ke sekolah-sekolah, mereka hanya melakukan sosialisasi ke pasar-pasar dan melakukan kas keliling. Namun mereka terus berusaha dengan dilakukannya pameran produk serta adanya diskon, *reward* dan *cashback* dari pihak bank syariah.¹²⁷

Berdasarkan analisis peneliti dalam menjalankan bulan inklusi keuangan saat pandemi kurang maksimal karena adanya pembatasan interaksi sosial. Di BPRS Sukowati Sragen saat masa pandemi kegiatan untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan juga masih belum stabil.

Kepemilikan rekening (*account-holding*) dalam lembaga keuangan menjadi sebuah indikator utama sebagai tolak ukur keberhasilan (*outreach*) dari inklusi keuangan. Kepemilikan rekening berarti bahwa masyarakat memiliki dan diasumsikan mampu menggunakan akses layanan keuangan tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*financing*) dan meningkatkan kegiatan ekonominya.¹²⁸

Sebagaimana yang disampaikan oleh fajriyah di BPRS Sukowati Sragen tingkat kepemilikan rekening dikalangan masyarakat tetap positif di tengah banyak nya dampak yang terjadi pada masa pandemi. Dari sini bisa dikatakan inklusi keuangan terus meningkat dari kepemilikan rekening maupun

¹²⁷ Lihat Transkrip Wawancara nomor 01/W/13-IX/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹²⁸ Saptia, Yeni dan Nugroho, A.E, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI-Press, 2017, 63.

penggunaan rekening di BPRS Sukowati Sragen. Kepemilikan rekening di masa pandemi justru mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan sebelum masa pandemi, walaupun masih ada nasabah yang hanya memiliki rekening saja namun tidak dilanjutkan untuk transaksi. Dengan kepemilikan rekening tersebut di perkirakan nasabah mampu menggunakan akses layanan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan mereka.¹²⁹

Berdasarkan analisis penulis kepemilikan rekening di BPRS Sukowati Sragen terus mengalami peningkatan selama masa pandemi. Namun peningkatan rekening perbankan tidak diimbangi dengan frekuensi produk dan layanan keuangan yang seharusnya dilakukan secara terus menerus, maka dari itu perlu ditingkatkannya frekuensi, keteraturan dari penggunaan produk dan layanan yang ada di BPRS Sukowati Sragen.

Dalam inklusi keuangan terdapat dimensi untuk mengukur keberhasilan dari program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemampuan masyarakat miskin dan pemilik usaha atau UMKM untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggunakan

¹²⁹ Lihat Transkrip Wawancara nomor 05/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

jasa keuangan menunjukkan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank.¹³⁰

BPRS Sukowati Sragen dalam memperluas akses dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat seperti sosialisasi-sosialisasi, grebek pasar dan kas keliling. Namun kegiatan yang dilakukan di masa pandemi terbatas. Pihak BPRS Sukowati Sragen terus berinovasi untuk meningkatkan akses yang mudah dan biaya yang terjangkau pada saat pandemi khususnya masyarakat lapisan bawah dan masyarakat pelosok.¹³¹

Berdasarkan analisis penulis bahwasannya salah satu peran penting inklusi keuangan bagi UMKM di masa pandemi Covid 19 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengalami kesulitan khususnya terkait dengan permodalan untuk pengembangan UMKM. Seharusnya penyelenggara inklusi keuangan di masa pandemi dilakukan dengan memberikan akses yang lebih merata dan efisien terhadap produk dan layanan keuangan serta menjangkau populasi yang lebih luas wilayahnya dan yang belum terlayani sepenuhnya dengan harapan dapat mengurangi risiko ekonomi dan sosial, dampak sosial yang timbul dari pandemi.

¹³⁰ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹³¹ Lihat Transkrip Wawancara nomor 05/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

b. Penggunaan

Dalam dimensi penggunaan ini, terdapat faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa dan produk keuangan. Misalnya, seperti frekuensi, durasi penggunaan, dan keteraturan.¹³²

Saat pandemi itu penggunaan produk perbankan dalam hal pembiayaan untuk para pemilik usaha dibuat alternatif pembiayaan berkelompok. Jadi dibentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang dan dibentuk ketua kelompoknya yang nanti ketika akan melakukan pembiayaan menggunakan jaminan ketua kelompok. Selain itu untuk angsurannya juga dikelompokkan menjadi satu ke ketua kelompok dan nanti jika sudah terkumpulkan maka langsung di serahkan ke bank syariah Sragen. Pembiayaan bermasalah selama pandemi sekitar 5-10% dari sebelumnya.¹³³

Berdasarkan analisis peneliti alternatif yang dibuat oleh BPRS Sukowati mengenai pembiayaan berkelompok sangat sesuai. Dikarenakan pada saat pandemi banyak masyarakat khususnya pemilik UMKM yang terdampak dan membutuhkan suntikan modal dari perbankan. Dengan alternatif seperti itu maka mampu memperluas akses masyarakat untuk bisa menggunakan jasa dan layanan keuangan di BPRS Sukowati Sragen dengan mudah dan biaya terjangkau.

¹³² Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹³³ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

c. Kualitas

Dalam dimensi ini terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan produk dan jasa keuangan apakah telah memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan kualitas produk dan jasa keuangan yang baik, dalam hal ini ketika suatu jasa digunakan, masyarakat dapat memberikan manfaat sesuai dengan keinginannya.¹³⁴

Kualitas produk dan layanan di BPRS Sukowati Sragen sudah baik dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah begitu juga dengan produk yang di sediakan mampu memeberikan manfaat untuk nasabahnya. Kelengkapan produk di BPRS Sukowati Sragen mencakup simpanan baik tabungan deposito dan juga pembiayaan dengan menggunakan berbagai akad. Pemberian pembiayaan kepada para pelaku UMKM menggunakan pembiayaan LPDB dengan akad Murabahah untuk pelaku usaha makro dan juga murabahah modal kerja untuk pelaku mikro.¹³⁵

Berdasarkan analisis peneliti kualitas produk yang ada di BPRS sudah sangat baik karena selalu memberikan yang terbaik dengan memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan dengan biaya yang terjangkau.

¹³⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹³⁵ Lihat Transkrip Wawancara nomor 03/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

2. Analisis Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Layanan keuangan yang tersedia di BPRS Sukowati Sragen sudah dianggap mampu memenuhi dan membantu para pemilik UMKM dalam hal permodalan. Dengan adanya sinergi antara BPRS dan nasabah memberikan pengaruh BPRS untuk mampu membantu pendanaan pemilik usaha yang membutuhkan. Semakin jauh dan semakin dalam yang di jangkau oleh pihak BPRS maka semakin banyak juga pemilik UMKM yang bisa di dibantu dalam hal permodalannya sehingga akan dapat mengembangkan usaha yang dijalankan saat pandemi, banyak masyarakat yang usahanya terdampak covid, BPRS Sukowati memberi solusi dengan memberikan pembiayaan yang berkelompok dan sesuai dengan kemampuan bayar mereka. Inklusi keuangan dalam bentuk pemberian pembiayaan cukup membantu dalam menunjang kebutuhan UMKM. Kontribusi yang diberikan bergantung dengan jenis dan ukuran usahanya. Begitu juga pada saat pandemi sekarang ini bahkan hampir sebagian besar pemilik UMKM terdampak maka dari itu pihak BPRS akan memberikan kelonggaran dalam angsuran pembiayaan.¹³⁶

Berdasarkan analisis peneliti selama pandemi BPRS Sukowati Sragen dalam penerapan inklusi keuangan sudah dikatakan efektif. Mereka terus mengakselerasi pembiayaan ke para pelaku UMKM terdampak covid untuk

¹³⁶ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

keberlangsungan usaha yang dijalankan. BPRS Sukowati Sragen berinisiatif untuk membuat pembiayaan berkelompok supaya mempermudah nasabah yang tidak mempunyai jaminan. Dan pemberian restrukturisasi dimasa pandemi merupakan hal yang sangat wajar dikarenakan kemampuan bayar para nasabah menurun dimasa pandemi ini.

Inklusi keuangan dimasa pandemi memiliki tujuan Inklusi keuangan terhadap UMKM harus didorong dan terus didukung untuk berkembang. Hal ini sangat penting agar tujuan ekonomi dan tujuan sosial seperti pengentasan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup dapat diwujudkan.¹³⁷

Sebagaimana yang dikatakan general manager BPRS Sukowati Sragen inklusi keuangan dimasa pandemi ini sebagai wujud pengentasan kemiskinan. Jadi semua biaya diberikan ke dinas sosial yang kemudian akan disalurkan kepada para pemilik UMKM yang membutuhkan dan yang sudah dilakukan pendataan. Kemudian jika sudah dianggap layak untuk berdiri sendiri setelah dibiayai maka nasabah bisa terlepas dari pembiayaan bank dan pembiayaan itu selanjutnya di berikan ke yang lain yang lebih membutuhkan. Semacam ini disebut pengentasan kemiskinan.¹³⁸

Berdasarkan analisis penulis pengentasan kemiskinan bisa teratasi ketika diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat yang akan

¹³⁷ Menna Allah Ahmed Fouad, "Factors Affecting The Performance Of Small And Medium Enterprise (SMES) In The Manufacturing Sector."

¹³⁸ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

menyebabkan peningkatan pula pada inklusi keuangan yang pada akhirnya akan berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Masyarakat yang menguasai pengetahuan dan pemahaman pengelolaan keuangan yang baik akan lebih mudah mengakses berbagai layanan keuangan yang disediakan oleh bank serta lembaga-lembaga keuangan lainnya dalam bentuk kemudahan bertransaksi, kesempatan memperoleh kredit modal usaha dan pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Maka dari itu BPRS Sukowati Sragen harus terus memaksimalkan literasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat.

3. Analisis Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Saat Pandemi

Financial inclusion (keuangan inklusif) menurut *World Bank* yang dikutip oleh Supartoyo dan Kasmiasi adalah sebagai kegiatan komprehensif atau menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan jasa keuangan.¹³⁹

Berdasarkan paparan data kendala yang dihadapi BPRS Sukowati Sragen di masa pandemi adalah belum adanya platform digital. Adanya penyedia kredit lain yang menawarkan pembiayaan lebih cepat dan mudah tanpa adanya jaminan.

¹³⁹ Supartoyo, The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, (2014), 435.

Berdasarkan analisis penulis perlu diketahui bahwasannya mobilisasi masa dimasa pandemi ini terbatas, sehingga berpengaruh juga terhadap mobilisasi ke lembaga keuangan. Jika lembaga itu belum memiliki platform digital maka akan mempersulit mobilisasi nasabah ke lembaga keuangan. BPRS Sukowati Sragen harus terus mengedukasi masyarakat supaya bisa memilih lembaga keuangan yang terjamin keamanannya.

C. Analisis Perbandingan Mekanisme, Efektifitas dan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Pandemi

1. Analisis Perbandingan Mekanisme Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Masa Pandemi

Penerapan inklusi keuangan dengan adanya program Bulan Inklusi Keuangan atau BIK merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Kementerian atau Lembaga Industri Jasa keuangan dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan secara serentak di wilayah Indonesia selama bulan oktober setiap tahunnya.

Terdapat perbandingan dalam penerapan program inklusi keuangan yaitu pada Bulan Inklusi Keuangan antara sebelum dan saat pandemi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Bulan Inklusi Keuangan sebelum dan saat pandemi

Unsur	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Bulan Inklusi Keuangan	1. Melakukan sosialisasi ke sekolah 2. Grebek pasar 3. Pameran produk atau jasa keuangan secara langsung	1. Tidak melakukan sosialisasi ke sekolah 2. Grebek pasar 3. Pameran produk atau jasa keuangan secara virtual

Berdasarkan perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa BPRS Sukowati Sragen melaksanakan bulan inklusi keuangan yang diselenggarakan setiap bulan Oktober. Perbedaan bulan inklusi keuangan sebelum pandemi dan pada saat pandemi adalah di bulan inklusi keuangan sebelum pandemi pihak BPRS Sukowati Sragen melakukan sosialisasi-sosialisasi mendatangi sekolah-sekolah, pasar untuk melakukan edukasi bagi masyarakat yang belum mengetahui lembaga keuangan. Sasaran yang dituju para siswa, masyarakat dan pedagang di pasar begitu juga pemilik usaha juga. Bulan inklusi keuangan tersebut diselenggarakan dengan melakukan pameran berbagai produk atau jasa keuangan yang dibuat semenarik mungkin seperti adanya diskon, *reward*, *cashback* dan pagelaran pameran itu dilakukan secara langsung. Sedangkan pada saat pandemi BPRS Sukowati Sragen tidak melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena adanya terbatasnya interaksi sosial. Dan juga kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya itu terbatas dan tidak semua berjalan.

Pelaksanaan bulan inklusi keuangan selama pandemi yaitu melakukan pameran dan sosialisasi secara virtual dalam bentuk webinar.¹⁴⁰

Kamalesh Shailesh C. Chakrobarty mengatakan *financial inclusion* mempromosikan penghematan dan mengembangkan budaya menabung, meningkatkan akses kredit, baik kewirausahaan maupun konsumsi dan juga memungkinkan mekanisme pembayaran yang efisien, sehingga memperkuat basis sumber daya lembaga keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi sebagai sumber daya dan tersedianya mekanisme pembayaran yang efisien dan alokatif.¹⁴¹

Terdapat perbandingan dalam pemberian akses kredit atau pembiayaan ke pelaku usaha makro maupun mikro, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Perbandingan Pemberian pembiayaan UMKM

Unsur	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Pemberian pembiayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Murabahah modal kerja baik pelaku usaha besar kecil.	Pelaku usaha besar awal tahun 2020 menggunakan pembiayaan LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Program dari pemerintah dan usaha mikro tetap Murabahah modal kerja.
	Tidak terdapat Restrukturisasi pembiayaan	Terdapat restrukturisasi Pembiayaan.
Pemberian pembiayaan ke	Tidak bisa mengakses lembaga keuangan.	Pembiayaan berkelompok bagi nasabah yang tidak

¹⁴⁰ Lihat Transkrip Wawancara nomor 01/W/13-IX/2021 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹⁴¹ Novia Nengsih, Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia, *Etikonomi*, Volume 14 Nomor 2 (Oktober 2015), 223.

pemilik UMKM yang tidak memiliki jaminan		memiliki jaminan.
Pembiayaan bermasalah	Terjadi pembiayaan bermasalah	Kenaikan pembiayaan bermasalah sekitar 5-10% dari sebelumnya.

Kepemilikan rekening (*Account holding*) di lembaga keuangan merupakan indikator kunci sebagai ukuran keberhasilan (*outreach*) keuangan inklusif. Kepemilikan rekening berarti masyarakat telah dan dianggap dapat menggunakan akses jasa keuangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*financing*) dan meningkatkan kegiatan ekonominya.¹⁴²

Tabel 4.3
Perbandingan kepemilikan rekening sebelum dan saat pandemi

Unsur	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Kepemilikan rekening di BPRS Sukowati Sragen	Standart	Mengalami peningkatan

Sebagaimana yang disampaikan oleh fajriyah di BPRS Sukowati Sragen tingkat kepemilikan rekening dikalangan masyarakat tetap positif di tengah banyak nya dampak yang terjadi pada masa pandemi. Dari sini bisa dikatakan inklusi keuangan terus meningkat dari kepemilikan rekening maupun penggunaan rekening di BPRS Sukowati Sragen. Kepemilikan rekening di masa pandemi justru mengalami peningkatan drastis dibandingkan dengan sebelum masa pandemi, walaupun masih ada nasabah yang hanya memiliki

¹⁴² Saptia, Yeni dan Nugroho, A.E, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI-Press, 2017, 63.

rekening saja namun tidak dilanjutkan untuk transaksi. Dengan kepemilikan rekening tersebut di perkirakan nasabah mampu menggunakan akses layanan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁴³

Secara umum terdapat empat dimensi keuangan inklusif, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemampuan masyarakat miskin dan pemilik usaha atau UMKM untuk memanfaatkan jasa lembaga keuangan. Dalam hal ini, faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggunakan jasa keuangan menunjukkan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam membuka dan menggunakan rekening bank.¹⁴⁴

b. Penggunaan Layanan

Dalam dimensi penggunaan ini, terdapat faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur penggunaan jasa dan produk keuangan. Misalnya, seperti frekuensi, durasi penggunaan, dan keteraturan.¹⁴⁵

c. Kualitas Produk

Dalam dimensi ini terdapat faktor-faktor yang dapat digunakan untuk menentukan ketersediaan produk dan jasa keuangan apakah telah

¹⁴³ Lihat Transkrip Wawancara nomor 05/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

¹⁴⁴ Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 220

¹⁴⁵ *Ibid.*, 220

memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan kualitas produk dan jasa keuangan yang baik, dalam hal ini ketika suatu jasa digunakan, masyarakat dapat memberikan manfaat sesuai dengan keinginannya.¹⁴⁶

Tabel 4.4

Perbandingan dimensi inklusi keuangan sebelum dan saat pandemi

Unsur	Sebelum Pandemi	Saat Pandemi
Perluasan akses	1. Layanan titik kantor 2. Kas keliling 3. Sosialisasi ke masyarakat 4. Kerjasama dengan pemerintah setempat	1. Layanan titik kantor 2. Kas keliling terbatas 3. Sosialisasi ke masyarakat sedikit berkurang 4. Kerjasama dengan pemerintah setempat
Penggunaan layanan	pelayanan <i>teller</i> dan <i>customer service</i> . BPRS Sukowati Sragen juga menggunakan layanan jemput bola, dan kas keliling.	Sama-sama menggunakan pelayanan <i>teller</i> dan <i>customer service</i> dan kas keliling namun aktivitasnya terbatas.
Kualitas produk	Sesuai dengan kebutuhan nasabah	Sesuai dengan kebutuhan nasabah

¹⁴⁶ Ibid., 220

2. Analisis Perbandingan Efektifitas Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Saat Masa Pandemi

Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat. Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terlayani keuangan formal, yaitu 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah, yang memiliki jangkauan ke layanan keuangan terbatas.¹⁴⁷

Tingkat efektifitas penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen bisa dikatakan lebih efektif pada saat sebelum pandemi. Hal itu dikarenakan sebelum pandemi interaksi sosial tidak dibatasi, sedangkan selama masa pandemi adanya pembatasan interaksi sosial sehingga untuk terjun langsung ke masyarakat sedikit terhambat. Kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terlayani keuangan formal. Sebelum pandemi 60% masyarakat sudah bisa menjangkau layanan keuangan yang tersedia. Dan pada saat masa pandemi hanya dibawah 60% yang bisa dijangkau.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dalam <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>, (diakses pada tanggal 25 September 2021, jam 13.00).

¹⁴⁸ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

Berdasarkan analisis peneliti walaupun tingkat akses masyarakat masih dibawah dari sebelum pandemi namun BPRS Sukowati Sragen terus mengakselerasi pembiayaan ke para pelaku UMKM terdampak covid untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. BPRS Sukowati Sragen berinisiatif untuk membuat pembiayaan berkelompok supaya mempermudah nasabah yang tidak mempunyai jaminan. Dan pemberian restrukturisasi dimasa pandemi.

3. Analisis Perbandingan Kendala Penerapan Inklusi Keuangan dalam Pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen Sebelum dan Masa Pandemi

Menurut *World Bank* inklusi keuangan merupakan kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala hambatan akses masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia.¹⁴⁹

Namun dalam penerannya masih terdapat kendala kendala baik itu sebelum dan saat masa pandemi. Perbandingan kendala yang dihadapi dalam penerapan inklusi keuangan selama pandemi lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi. Sebagaimana yang dikatakan general manager BPRS Sukowati Sragen kendala-kendala baik sebelum dan saat pandemi itu hampir sama dan bahkan selama pandemi ada kendala yang paling menonjol yaitu belum adanya platform digital yang di miliki oleh BPRS Sukowati Sragen.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Supartoyo, The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan, (2014), 435.

¹⁵⁰ Lihat Transkrip Wawancara nomor 02/W/04-IV/2022 dalam lampiran laporan hasil penelitian

Berdasarkan analisis peneliti memang benar jika lembaga itu belum memiliki platform digital maka akan mempersulit mobilisasi nasabah ke lembaga keuangan. Begitu juga sebaliknya jika ada platform digital maka bisa mempermudah akses layanan perbankan baik sebelum dan saat pandemi.



BAB V

PENUTUP

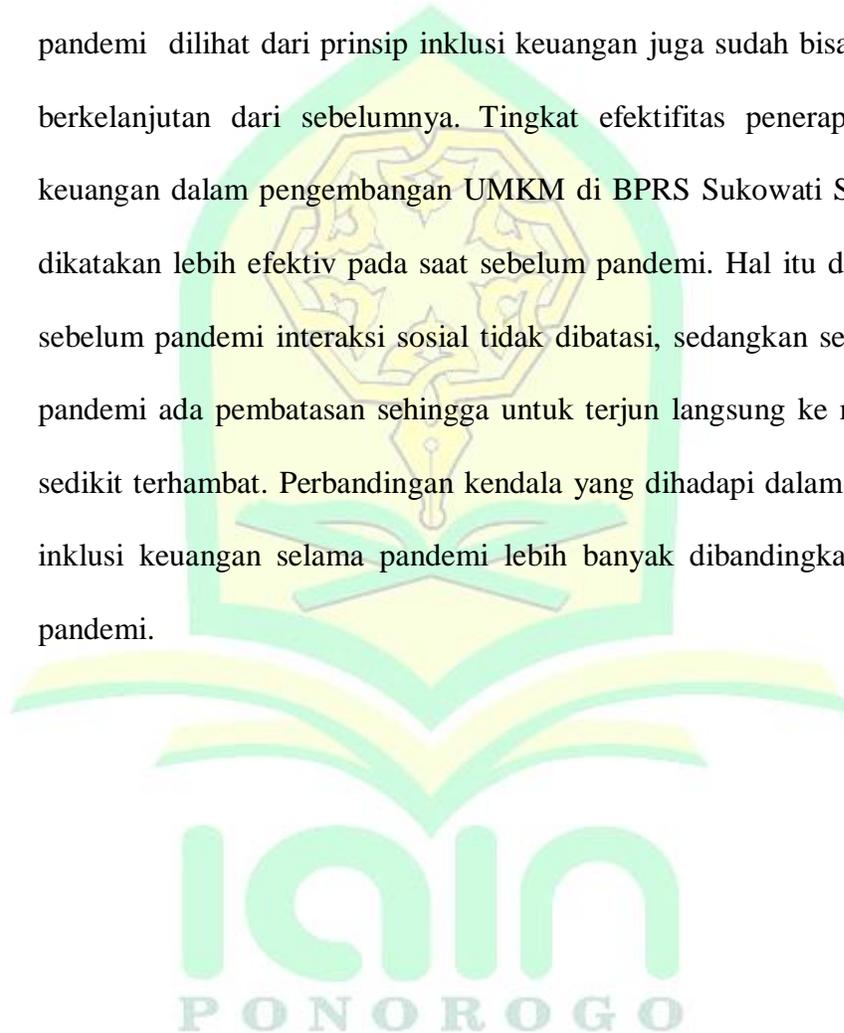
A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan inklusi keuangan yang di lakukan dengan terus meningkatkan sosialisasi-sosialisasi kesekolah, ke pasar dengan memberikan edukasi keuangan kepada seluruh lapisan masyarakat. Penerapan inklusi keuangan sebelum pandemi di BPRS Sukowati Sragen bisa dikatakan efektif karena beberapa tujuan dan sasaran inklusi keuangan bisa dicapai. Kendala penerapan inklusi keuangan yang pertama berasal dari internal bank itu sendiri yang masih terbatas dalam menjangkau masyarakat pelosok, kurangnya pengetahuan nasabah terkait lembaga keuangan sehingga sulit untuk ditarik menjadi nasabah bank syariah, pembiayaan terkendala agunan sebagai *second way out* dikarenakan pembiayaan harus tetap aman, pola hidup para pemilik usaha konsumtif.
2. Selama masa pandemi dalam hal akses ke masyarakat lembaga keuangan mengalami keterbatasan dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat. selama pandemi BPRS Sukowati Sragen dalam penerapan inklusi keuangan sudah dikatakan efektif. Mereka terus mengakselerasi pembiayaan ke para pelaku UMKM terdampak covid untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Namun BPRS Sukowati Sragen

saat masa pandemi memiliki kendala belum adanya platform digital untuk mempermudah mobilisasi masa nasabah.

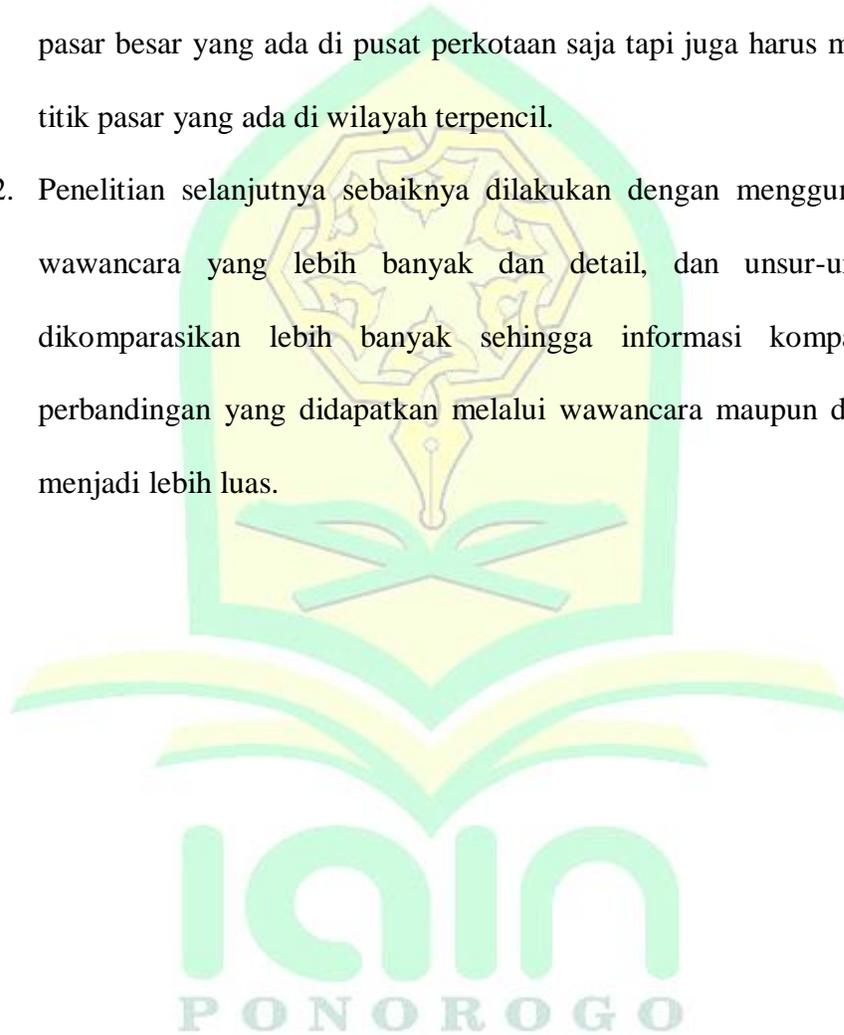
3. Perbandingan dalam mekanisme penerapan inklusi keuangan sebelum pandemi dilihat dari prinsip inklusi keuangan sudah terukur dan saat pandemi dilihat dari prinsip inklusi keuangan juga sudah bisa dikatakan berkelanjutan dari sebelumnya. Tingkat efektifitas penerapan inklusi keuangan dalam pengembangan UMKM di BPRS Sukowati Sragen bisa dikatakan lebih efektif pada saat sebelum pandemi. Hal itu dikarenakan sebelum pandemi interaksi sosial tidak dibatasi, sedangkan selama masa pandemi ada pembatasan sehingga untuk terjun langsung ke masyarakat sedikit terhambat. Perbandingan kendala yang dihadapi dalam penerapan inklusi keuangan selama pandemi lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi.



B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kedepannya, sebagai berikut :

1. Cakupan untuk melakukan grebek pasar harusnya diperluas tidak hanya pasar besar yang ada di pusat perkotaan saja tapi juga harus menjangkau titik pasar yang ada di wilayah terpencil.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan menggunakan data wawancara yang lebih banyak dan detail, dan unsur-unsur yang dikomparasikan lebih banyak sehingga informasi komparasi atau perbandingan yang didapatkan melalui wawancara maupun di lapangan menjadi lebih luas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio Syafi'i dan Karnaen A. Perwatadmadja. Apa dan Bagaimana Bank Islam . Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia dari Desa*, Yogyakarta: Media Pressindo. 2016.
- Irfan Syauqi Beik dan Laili Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Iqbal, Badar Alam. "Role of banks in financial inclusion in India." *Contaduriay Administracion*. 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana Pnamedia Group: Jakarta. Cet. 1. 2011.
- Kasmianti, *Branchless Banking Mewujudkan Keuangan Inklusif Sebagai Alternatif Solusi Inovatif Menanggulangi Kemiskinan*. *ACADEMIA*. Bogor.
- Klapper, Kunt Leora. "Financial Inclusion in Afrika An Overview." *The World Bank Development Research Group*. April.
- Lestari, Kurnia Cahya. *Sistem Informasi Akuntansi (Beserta Contoh Penerapan Aplikasi SIA Sederhana Dalam UMKM)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2018.
- Narbuko, dan Abu Achmadi. *Dalam Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nuriutomo, Totok Budisantoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta selatan. 2008.
- Prastowo, Andi . *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).
- Reyes, G. P. *Financial Inclusion Indicators for Developing Countries: The Peruvian Case*. Peru: Superintendency of Banking. 2010.
- Rika Desiyanti, dan Hamirul. *Covid-19 Merubah Wajah Indonesia, Literasi dan Inklusi Keuangan UMKM Selama Pandemi*. Malang: Pustaka Learning Center. 2020.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2006.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Citra. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2019.

- Supartoyo. *The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case of Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan. 2014.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Wahid, Nusron. *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan; Peran Kredit Usaha Rakyat Dalam Menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran*. KPG Bekerjasama dengan Inter Café IPB dan OJK. Jakarta. 2014
- Wardhono, Adhitya. *Inklusi Keuangan dan Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Pustaka Abadi, 2018.

Jurnal

- Adriani, Diana. "Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya dengan Pertumbuhan UMKM Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali," *E-Jurnal Manajemen Unud*, 12, 7 (2018), 1.
- Ahyar, Muhammad Khozin. "Inklusi Keuangan Syariah terhadap Pembiayaan UMKM Sektor Halal Indonesia." *Al-Tijary*. No 5. 2019, 23.
- Fitriani, Widya. "Penguatan Inklusi Keuangan pada Industri Kreatif Berskala Mikro Kecil di Sumatera Barat," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20 Mei 2019, 1.
- Fouad, Menna Allah Ahmed. "Factors Affecting The Performance Of Small And Medium Enterprise (SMES) In The Manufacturing Sector." *International Journal Of Business and Management Studies*. No 2. Vol 5. 2013, 159.
- Irmawati, Setyani. "Model Inklusi Keuangan pada UMKM Berbasis Pedesaan." *Jejak: Journal of Economics and Policy*, Volume 6, Nomor 2, 2013, i.
- Khatimah, Husnul . "Analisis Efektivitas Inklusi Keuangan di BMT Syariah Riyal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 10, Nomor 2, (2016), 128.
- Kusuma, Melia. "Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlanjutan UMKM." *Jurnal Among Makart.*, Vol. 14. No. 2. (2021), 436.
- Laili, Novia Yusufyanti. "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. No 3. Vol 6. 2020, 436.
- Leyshon, A., & Thrift, N, *Geographies of Financial Exclusion: Financial Abandonment in Britain and the United States*, JSTOR, New Series, 1995, Vol. 20, No. 3, 312.
- M. Mahbubi Ali, Muhammad Rizky, dan Abrista Devi, "Developing an Islamic Financial Inclusion Index For Islamic Bank in Indonesia : A Cross – Province Analysis," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 4, 5. 2019, ii.

- Muh. Awal Satrio Nugroho. "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)." Universitas Islam Indonesia. 2021.
- Nengsih, Novia. Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia. *Etikonomi*. Vol 14 No 2 (Oktober 2015), 223.
- Nindy, Safira. "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM Pada Masa Pandemi Covid 19," *Competitive*, Volume 16, Nomor 2, (2021). ii
- Nugroho, A.E. *Politik Ekonomi Kredit Program Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro-Kecil: Dari Bimas Hingga Kredit Usaha Rakyat*. 2017, 60.
- Nugroho, Taufik. "Strategi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada LPDB." *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, No 1. Vol 3. Mei 2019, 57.
- Radhautul Jannah, Yana, "Studi Komparasi Tingkat Inklusi Keuangan di Negara ASEAN," *Jurnal QE*, Volume 6, Nomor 2, (2017), 85.
- Saptia, Yeni dan Nugroho, A.E, *Penguatan Peran Program Kredit Mikro Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Sektor Pertanian*, Jakarta: LIPI-Press. 2017, 63.
- Sarma, Mandira. "Index of Financial Inclusion - A Measure of Financial Sector Inclusiveness." *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*. Juli 2012, 3.
- Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2012, Vol. 3 No.1, 16.
- Wira Iko Putri Yanti, "Pengaruh Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara," *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1, 2. 2019, 1.

Skripsi

- Aseh, Pamuji. "Analisis inklusi keuangan syariah pada UMKM di masyarakat Madani Sumut Kecamatan Percut Sei Tuan," Skripsi (Sumut: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), ii.
- Bahri, Samsir. "Analisis Implementasi Keuangan Inklusi Bagi UMKM pada Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Nululawang Malang," *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021), viii.
- Kurnia, Eva Yuni. "Implementasi program inklusi keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil pada kspps Bmt Ummah Surabaya," Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Surabaya, 2019). I

- Manustama, Hermuda. "Efektivitas Keuangan Inklusif Terhadap Perkembangan UMKM di Surabaya", *Skripsi* (Surabaya: STIE Perbanas Surabaya, 2018), 1.
- Novia Yusfiyanti Laili dan Rohmawati Kusumaningtias, "Efektivitas Inklusi Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM (Studi Pada BMT Dasa Tambakboyo).
- Nugroho, Muh. Awal Satrio, "Peran Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021).
- Rodika, Deri Ofit. "Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri KC Curup," *Skripsi* (Curup: IAIN Curup, 2018). viii.
- Sandi, Okter Linus. "Implementasi Keuangan Inklusif PT. BRI Syariah Cabang Bengkulu", *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), viii.
- Wulandari, Rossy. "Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM." UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Website

- Company Profile PT. BPRS Sukowati Sragen, www.banksyariahsragen.com, Diakses 14 September 2021, jam 13.00
- Ehrbeck, "Financial Inclusion, Stability, integrity, and Consumer Protection." CGAP." (<http://www.cgap.org/blog/financial-inclusionstability-integrity-and-consumer-protection>). 2013.
- Inklusi Keuangan untuk Semua, dalam <https://www.inklusikeuangan.id/halaman/bulan-inklusi-keuangan>, diakses pada 04 Maret 2022, jam 12.00 WIB.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam, <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/inklusi-keuangan-terus-diakselerasi-di-masa-pandemi-covid-19/>, diakses pada 04 Maret 2022, jam 11.00.
- LPDB KUMKM Mitra untuk Bangsa, dalam <https://www.lpdb.id/program/sektor-simpan-pinjam/>, (diakses tanggal 5 Maret 2022 jam 20.00).
- OJK. Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019. Diakses pada 15 September 2021, jam 15.30, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>
- Strategi Nasional Keuangan Inklusif, dalam <https://snki.go.id/keuangan-inklusif/>, (diakses pada tanggal 25 September 2021, jam 13.00).

Wawancara

Agung setiti, Wawancara, 04 April 2022

Desi wulandari, Wawancara, 04 April 2022

Fajriyah, Wawancara, 04 April 2022

Wisnu Ari Murti, Wawancara, 13 September 2021

